

**ANALISIS QUADRUPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA HALAL DI KOTA YOGYAKARTA**

*(Quadruple Helix Analysis in The Development of Halal Tourism in
Yogyakarta City)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MELYANA DAMARSASI NURFADHILA

20423072

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Melyana Damarsasi Nurfadhila
NIM : 20423072
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Quadruple Helix Dalam Pengembangan
Pariwisata Halal DiKota Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 12 Maret 2025



Melyana Damarsasi Nurfadhila

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Skripsi : Analisis Quadruple Helix dalam Pengembangan
Pariwisata Halal di Kota Yogyakarta
Disusun oleh : MELYANA DAMARSASI NURFADHILA
Nomor Mahasiswa : 20423072

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME
Penguji I : Anom Garbo, SEI, ME
Penguji II : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.



Yogyakarta, 22 April 2025

Dekan




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat No: 1313/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2024 pada tanggal 30 September 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Melyana Damarsasi Nurfadhila

NIM : 20423072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Analisis Quadruple Helix Dalam Pengembangan
Pariwisata Halal di Kota Yogyakarta

Setelah kami menilite dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bersepakat bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa diikutsertakan dalam munaqasah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Yogyakarta, 12 Maret 2025



Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

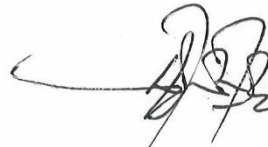
Nama Mahasiswa : Melyana Damarsasi Nurfadhila

NIM : 20423072

Judul Skripsi : Analisis Quadruple Helix Dalam Pengembangan
Pariwisata Halal Dikota Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Maret 2025



Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa yang berbahagia dimana penulis telah menyelesaikan skripsi ini dan penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Keluarga inti penulis, Ayah selaku kepala keluarga, penulis berterimakasih telah selalu mendukung dan tidak berhenti untuk selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Mama yang selalu ada disetiap waktu dan tidak berhenti berdoa untuk masa depan penulis. Adik bungsu yang selalu belajar untuk mendapatkan mimpinya dan menjadi teman bagi penulis.
2. Teman teman penulis yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan semangat kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

Jika terlalu sering menghindari kewajiban dan kesempatan baru, kita akan kehilangan lebih banyak dari pada yang kita bayangkan. – *The Psychology of Emotion*

Maka dari itu,

Pantaskan dirimu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Perkuat keyakinanmu dan perkuat ketabahanmu. Tuhan pasti memberi jika kamu siap menerima. – Kitairae

ABSTRAK
ANALISI QUADRUPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
HALAL DI KOTA YOGYAKARTA

MELYANA DAMARSASI NURFADHILA

20423072

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta. Pariwisata halal adalah pariwisata yang disesuaikan dengan prinsip syariah dengan konsep memberikan pengalaman wisata yang ramah bagi wisatawan muslim dengan menambahkan point point penting seperti makanan halal, tempat ibadah, serta fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara sebagai kerangka analisis untuk menilai kolaborasi antar stakeholder quadruple helix dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal. Hasil kolaborasi antar stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal masih belum efektif dan belum terjalin secara signifikan karena kurangnya koordinasi atau kurang melibatkan stakeholder lain dalam penerapan kebijakan pariwisata halal.

Kata kunci: Quadruple Helix; Pariwisata Halal; Kota Yogyakarta; Pengembangan Pariwisata Halal

ABSTRACT
QUADRUPLE HELIX ANALYSIS IN THE DEVELOPMENT OF HALAL
TOURISM IN YOGYAKARTA CITY

MELYANA DAMARSASI NURFADHILA

20423072

This study aims to analyze the role and effectiveness of quadruple helix stakeholders in the development of halal tourism in the city of Yogyakarta. Halal tourism is tourism that is adjusted to the principles of sharia principles with the concept of providing a friendly tourist experience for Muslim tourists by adding important points such as halal food, places of worship, and facilities in accordance with sharia principles. This research uses a qualitative method with an interview approach as an analytical framework to assess collaboration between quadruple helix stakeholders in achieving halal tourism development goals. The results of collaboration between quadruple helix stakeholders in the development of halal tourism are still not effective and have not been significantly established due to lack of coordination or lack of involvement of other stakeholders in the implementation of halal tourism policies.

Keywords: Quadruple Helix; Halal Tourism; Yogyakarta City; Halal Tourism Development

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.أَ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ.أَ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ.يَ.أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahatullahi Wabarakaatuh

Segala puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Sehingga berkat berkah dan karunia-Nya skripsi dengan judul “analisis quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta” dapat penulis selesaikan dengan senang hati. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga kerabat dan para sahabat yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Harapan yang besar peneliti agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bentuk evaluasi dan inovasi terhadap para stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata khususnya pariwisata halal. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa telah meluangkan waktu dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena hal tersebut, penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Islam.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, Lc., M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan serta saran dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan di masa perkuliahan.

7. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa narasumber akademisi yang telah memberikan kontribusi pada penelitian ini, yaitu: Muhammad Yusuf, Peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM; dan Prof. Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si., Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
8. Bapak Hartanto selaku narasumber peneliti dalam stakeholder pelaku bisnis yang telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi terkait bisnis tour and travel di Yogyakarta.
9. Bapak Jalu selaku narasumber peneliti dalam stakeholder komunitas GenPi Jogja yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan informasi terkait pariwisata dan pariwisata halal.
10. Ibu Cesaria Eka Yulianti Sri Hastuti sebagai Kepala Bidang Industry Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang senantiasa meluangkan waktunya, memberi saran, dan memberikan informasi terkait pengembangan pariwisata di Yogyakarta.
11. Seluruh keluarga inti, Mama, Ayah, dan Tasya yang telah mendukung dan terus berdoa sampai penulis menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Indonesia.
12. Miftahul Izzi Sulistyo selaku teman perjalanan penelitian yang telah menemani peneliti dalam mengumpulkan data dan senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti.
13. Ayya Sofia, Endang Ayu, Fachrina, Siti masitoh, dan Taqiyya selaku teman yang telah selalu mendukung, percaya dan selalu ada saat perjalanan menyelesaikan masa studi ini.
14. Teruntuk staf LWU UNISIA, Ibu Siti Achiria, Mba Deka, Mas Tirta, dan Badru Taqiyya selaku patner magang yang telah memberikan kenangan yang indah selama masa magang berlangsung.
15. Lee Seokmin selaku *happyvirus* peneliti yang tidak meninggalkan peneliti disaat waktu waktu terpenting datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
NOTA DINAS	4
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
MOTTO	7
ABSTRAK	8
<i>ABSTRACT</i>	9
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	10
KATA PENGANTAR.....	19
DAFTAR ISI.....	21
DAFTAR TABEL	23
DAFTAR GAMBAR.....	24
BAB I.....	25
PENDAHULUAN	25
A. Latar Belakang.....	25
B. Rumusan Masalah.....	37
C. Tujuan	38
D. Manfaat	38
E. Sistematika Penulisan	38
BAB II	40
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	40
A. Telaah Pustaka	40
B. Landasan Teori.....	49
1. Quadruple Helix	49
2. Pariwisata Halal.....	56
3. Teori Efektivitas	59
4. Hubungan Teori Efektivitas dengan Subjek dan Objek Penelitian.....	65
BAB III.....	68

METODE PENELITIAN	68
A. Desain Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	68
D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	68
E. Sumber Data	69
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Instrumen Penelitian	69
H. Teknik Analisis Data	69
BAB IV	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Profil Stakeholder Quadruple Helix.....	70
1. Pelaku Bisnis Jogja Halal Tour.....	70
2. Komunitas Generasi Pesona Indonesia Jogja	70
3. Akademisi Pusat Studi Pariwisata UGM.....	73
4. Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	73
B. Hasil Wawancara.....	78
1. Pelaku Bisnis Jogja Halal Tour.....	78
2. Komunitas Generasi Pesona Indonesia Jogja (GenPi Jogja)	82
3. Akademisi Pusat Studi Pariwisata UGM.....	86
4. Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	89
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	92
1. Peran Stakeholder Quadruple Helix	92
2. Efektivitas Kolaborasi Antar Stakeholder Quadruple Helix.....	96
BAB V	103
KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pariwisata Konvensional Dan Pariwisata Halal.....	57
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sumber: Mastercard Crescent rating GMTI 2023; June 2023	26
Gambar 1.2 Sumber: Badan Pusat Statistik 2024.....	27
Gambar 1.3 Sumber : Pusat Studi Pariwisata UGM 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

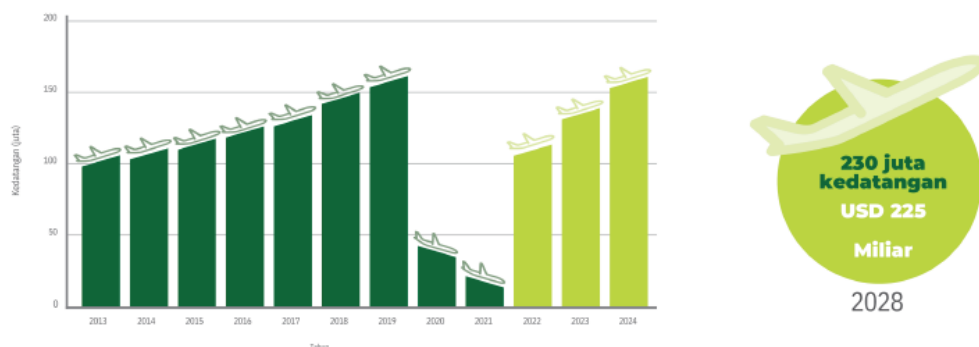
A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai tujuan pariwisata yang terkenal seperti pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Timur, Kota Yogyakarta, dan sebagainya. Melalui Kementerian Pariwisata ada 13 provinsi yang dijadikan sebagai destinasi wisata halal unggulan di Indonesia, yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Riau, Lampung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Maulida, 2023).

Ditahun 2024 pemulihan total terus berlanjut dengan total kedatangan muslim setara dengan angka pada tahun 2019 yaitu 160 juta. Meskipun terdapat tantangan global akibat pandemi COVID-19, muslim travel market telah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang kuat dan kini berada pada jalur pemulihan. Tahun 2022 mencatatkan kedatangan Muslim Internasional menjadi 110 juta atau 68% dari jumlah kedatangan Muslim pada tahun 2019 sebelum pandemi. Tren pertumbuhan mencerminkan proyeksi untuk tahun 2023 yang mencapai 140 juta, dimana jumlah itu mewakili 87% dari angka tahun 2019 (*GMTI 2023 Report Final Version 1st June, 2023*)

Dalam Global Islamic Economy Report Indonesia, Indonesia merupakan negara terbesar dalam pulaunya yang memiliki 88% populasi muslim, lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 300 suku, 746 jenis bahasa dan dialek, serta mega biodiversity dan ada lebih

dari 800.000 masjid yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata halal karena pada dasarnya, budaya Indonesia sudah memiliki DNA gaya hidup halal (Ropik & Kawwami, 2022). Konsumsi Muslim terbesar di dunia di 6 sektor: Makanan, pariwisata, pakaian, farmasi, media atau rekreasi, dan kosmetik, sebesar US\$2 Triliun atau 11,9% dari konsumsi masyarakat di dunia. Angka tersebut di atas konsumsi Tiongkok di 6 sebesar US\$1,8 triliun atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia (Djakfar & Press, n.d.).

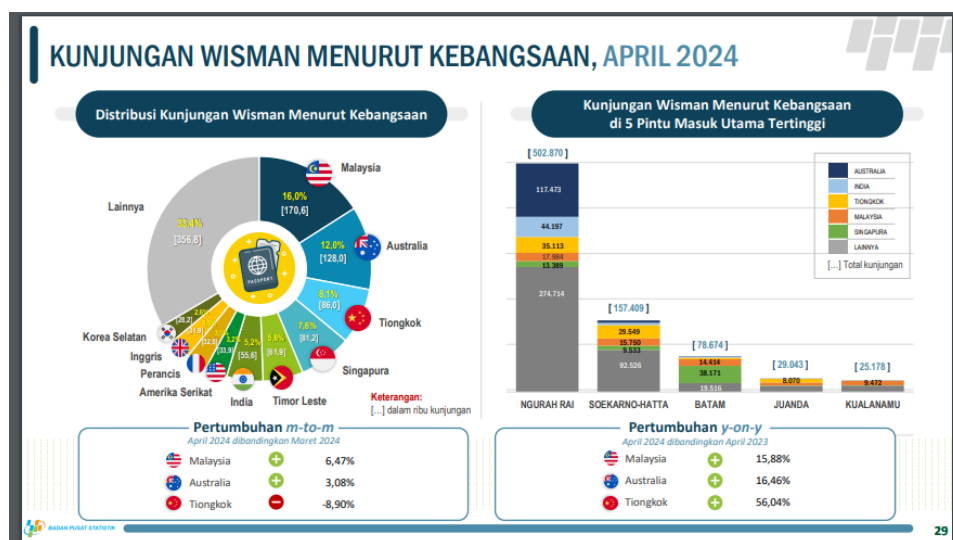


Gambar 1.1 Sumber: Mastercard Crescent rating GMTI 2023; June 2023

Pengembangan pariwisata halal adalah hal yang perlu dilakukan untuk wilayah yang terkenal dengan wisata budayanya untuk mengembangkan potensi ekonomi yang unggul sebagai salah satu pemasok penerimaan negara dengan prediksi 230 juta kedatangan wisatawan pada 2028. Dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) ada 4 indikator dalam penilaian wisata halal, yaitu *Accessibility* (aksesibilitas) ini mengacu pada kemudahan akses bagi wisatawan muslim seperti transportasi atau fasilitas pendukung kebutuhan, *Communication* (komunikasi) yang memberikan informasi dengan jelas dan mudah diakses terkait destinasi wisata halal seperti panduan dan

layanan dalam Bahasa yang dipahami oleh wisatawan muslim, *Environment* (lingkungan) yang mendukung dan nyaman bagi wisatawan muslim yang didalamnya termasuk ketersediaan tempat ibadah, makanan halal dan suasana yang sesuai dengan nilai nilai islam, dan kualitas *service* (layanan) yang diberikan kepada wisatawan muslim seperti keramahan staf pegawai, keamanan yang terjamin dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan khusus para wisatawan muslim.

Pariwisata halal bisa dilihat dari penilaian kesiapannya, pada beberapa aspek utama pariwisata; pertama itu produk. Pengembangan produk harus berdasarkan kreteria umum dan standarisasi yang diterapkan untuk usaha pariwisata halal dan daya tarik, kedua itu SDM dan kelembagaan. Kompetensi profesi insan pariwisata halal harus ditunjang dengan training dan pendidikan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan wisatawan muslim, yang ketiga itu promosi. Promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku wisatawan muslim (Syahrial, n.d.).



Malaysia merupakan negara islam yang sering mengunjungi Indonesia dengan 170,600 ribu kunjungan sehingga menempati peringkat pertama sebagai negara yang paling sering berkunjung (*Berita Resmi Statistik*, 2024). Indonesia sebagai negara dengan destinasi ramah muslim terbaik berdasarkan penilaian *Mastercard Crescent Rating* GMTI 2024 yang diselenggarakan di Singapura bulan Mei ini mendukung untuk memajukan perkembangan pariwisata halal di Indonesia (*Global Muslim Travel Index 2024*, 2024).

Hukum pariwisata halal sangat penting untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan ekonomi kreatif di setiap destinasi pariwisata. Hukum yang mengatur peraturan tertulis pariwisata halal belum menyatu dalam satu pasal tetapi masih mengacu pada 2 undang-undang, yaitu; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pariwisata halal merupakan hal yang mengacu pada layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditunjukkan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.

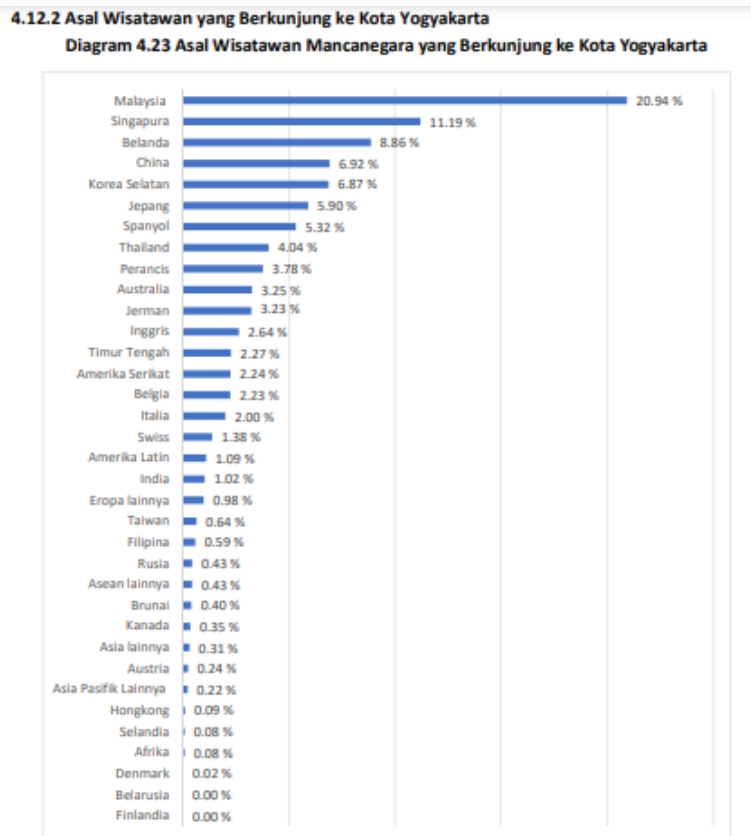
Landasan hukum pariwisata saat ini adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan berbagai kegiatan wisata yang didukung fasilitas dan layanan yang telah disediakan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Undang undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal digunakan sebagai pelengkap landasan hukum pariwisata halal karena belum ada pasal tersendiri terkait pariwisata halal. Peraturan pariwisata halal secara komprehensif ditemukan dalam

fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah tetapi fatwa ini tidak memiliki hukum mengikat. (Maulida, 2023)

Wisata syariah ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.108/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa konsep pariwisata halal itu merupakan hampir semua aspek pariwisata. Mulai dari destinasinya, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS), penginapan syariah, perawatan spa, dan agent travel tour syariah. Destinasi wisata dalam lingkup syariah merupakan wilayah geografis yang berada dalam satu/lebih wilayah administratif yang didalamnya ada daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas juga masyarakat yang saling terhubung dan melengkapi sehingga dapat terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konsep wisata syariah di dalam fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 dan praktik layanan pengelola wisata konvensional terhadap wisatawan muslim ada 2 perspektif yang harus dipahami, yaitu pertama, pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang ideal untuk ditawarkan kepada wisatawan, baik muslim atau nonmuslim. Kedua, pariwisata halal adalah bagian dari pariwisata yang telah dipraktekkan oleh pelaku usaha pariwisata. Menurut alexander dalam pengembangan pariwisata halal terdapat 3 potensi serta kekuatan yang Indonesia bisa kembangkan, pertama, potensi yang berasal dari keragaman sumber daya dan kekayaan nasional. Kedua, potensi dan

sikap masyarakat yang positif pada pengembangan pariwisata halal. Ketiga, Indonesia di posisi sebagai negara tujuan yang mempunyai investasi pada pariwisata halal dengan negara mayoritas muslim (Kemenparekraf, 2022). Pernyataan ini diperkuat oleh tingkat pertumbuhan pasar pariwisata halal yang signifikan serta diperkirakan pada tahun 2020 bahwa wisatawan muslim meningkat menjadi 180 juta wisatawan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9.08% (rate of growth forecast) sejak tahun 2014, hingga kemudian Kementerian Pariwisata berusaha untuk mengembangkan Wonderful Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik di dunia (Ropik & Kawwami, 2022).



Gambar 1. 3 Sumber : Pusat Studi Pariwisata UGM 2023

Kota Yogyakarta dikunjungi dari berbagai belahan dunia pada bulan desember tahun 2023 yang berjumlah 20.887 wisatawan, jika dilihat pada gambar diatas wisatawan paling banyak yang berkunjung ke Kota Yogyakarta antara lain malaysia (20,94%) dan singapura (11,19%).

Kota Yogyakarta termasuk dalam jajaran yang dipersiapkan kementerian pariwisata untuk menjadi destinasi pariwisata halal yang unggul di Indonesia (Nurlatifah, n.d.), kota Yogyakarta memiliki daya Tarik dari para wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara. Kota Yogyakarta memiliki berbagai macam daya tarik wisata seperti budaya, kuliner, pengunungan, laut, perkotaan, dan lain sebagainya. Ada beberapa destinasi menarik yang bisa dinikmati oleh para wisatawan layaknya Jl.Malioboro, alun-alun kidul, keraton Yogyakarta, museum, kebun Binatang, tamansari, taman pintar (tempat rekreasi edukasi). Dalam pariwisata halal ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi seperti keraton Yogyakarta, masjid gede kauman, tamansari, dan kaliurang atas salah satunya Nawang Jagat

Dalam portal berita pemerintah kota Yogyakarta yang telah diterbitkan, kepala bidang pengembangan sumber daya pariwisata dinas pariwisata DIY dan kepala dinas pariwisata kota Yogyakarta membuktikan bahwa sertifikat halal meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke kota Yogyakarta. Dengan kegiatan bimbingan teknis usaha jasa pariwisata “Menuju Halal 2024” mengajak pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal yang sah untuk menjamin kualitas produk dan pelayanan dibidang industry makanan dan minuman. Dalam penjelasannya sertifikat halal

bertujuan untuk membedakan jenis makanan halal dan tidak agar masyarakat tidak bingung. Masyarakat dan wisatawan juga akan merasa nyaman dan aman atas apa yang telah di perjualbelikan (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023).

Dalam buku Template Memandu Muslim Traveler Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah yang membahas tentang Muslim Traveler Pariwisata Daerah disebutkan bahwa mengklasifikasi kebutuhan muslim menjadi 2 tingkat secara garis besar, yaitu: Pertama, Kebutuhan dasar adalah kebutuhan fasilitas yang memudahkan seorang muslim melaksanakan kewajiban kewajiban dasar. Untuk melaksanakan ibadah shalat memerlukan tempat shalat dengan penunjuk arah kiblat, perlengkapan shalat, tempat berwudhu, toilet yang memiliki sarana bersuci dengan air dimana fasilitas fasilitas tersebut harus dapat dijumpai oleh wisatawan muslim di bandara, stasiun, pelabuhan, objek wisata, restoran, akomodasi, dan pusat perbelanjaan. Kedua, kebutuhan lain yang bisa menjadi point tambahan dan membuat nyaman wisatawan adalah terdapat restoran halal (bersertifikat), kolam renang yang terpisah untuk Wanita dan pria, hiburan yang sesuai dengan gaya hidup halal. Dengan adanya kriteria fasilitas umum yang digunakan wisatawan muslim menjadi sebuah tren dengan sebutan pariwisata halal (Rahardjo, n.d.).

Pengunjung pariwisata halal di kota Yogyakarta dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan selama 3 tahun terakhir. Di tahun 2022, jumlah pengunjung sekitar 1.2 juta orang dengan tren peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun 2021, faktor pendukung yang mempengaruhinya adalah promosi intensif destinasi halal dan

peningkatan fasilitas ibadah (sumber: BPS DIY dan Publikasi statistic pariwisata 2021). Di tahun 2023, jumlah pengunjung sekitar 1.5 juta orang dengan tren peningkatan sebesar 25% dibandingkan tahun 2022, faktor pendukung yang mempengaruhi adalah event pariwisata halal dan kolaborasi dengan industry makanan halal (sumber: laporan penelitian badan keahlian sekretariat jendral DPR RI 2023). Di tahun 2024, jumlah pengunjung sekitar 1,8 juta orang dengan tren peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun 2023, faktor pendukung yang mempengaruhi adalah ekspansi halal dan restoran bersertifikat halal serta program wisata halal yang telah terintegrasi (sumber: laporan dinas pariwisata DIY, BPS DIY).

Peningkatan jumlah pengunjung didukung oleh kebijakan pemerintah dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Dengan pertumbuhan yang konsisten dalam jumlah pengunjung pariwisata halal, Yogyakarta menunjukkan potensi yang besar sebagai destinasi wisata bagi wisatawan muslim. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prospek ke depannya, infrastruktur yang meningkat, peningkatan kesadaran akan pariwisata halal, event dan festival, dan kerjasama antar travel agent. Dengan keempat prospek yang dapat meningkatkan pengunjung secara bertahap ini bisa menjadikan Yogyakarta menjadi salah satu pusat pariwisata halal di Indonesia maupun luar negeri. Dalam hal pengembangan pariwisata halal ada aksesibilitas yang harus memadai bagi para wisatawan muslim dengan menyediakan hotel yang mendukung kegiatan beribadah dan terverifikasi halalnya, di kota Yogyakarta terdapat hotel yang telah terverifikasi kehalalannya. Melalui Halal.mui ada 2 hotel yang telah terverifikasi

yaitu, pertama, Hotel Cakra Kusuma, di Jalan Kaliurang KM 5, telah terverifikasi LPPOM MUI DIY pada 24 Mei 2016 dengan fasilitas pendukung kitab suci alqur'an di setiap kamar, penunjuk arah kiblat, kolam renang untuk laki laki dan Perempuan, dan tempat shalat dan wudhu. Kedua, Hotel Grand Dafam Rohan di Jalan Janti Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul. Telah terverifikasi pada 26 april 2018. Dengan fasilitas pendukung mushola di lobby hotel, alat shalat dan kitab suci alquran di setiap kamar, kolam renang dan fitness center terpisah untuk laki laki dan Perempuan, dan nuansa Islami yang kental.

Kebijakan lokal yang mendukung pengembangan pariwisata halal sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata halal dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pengembangan pariwisata halal di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata, sangat dipengaruhi oleh kebijakan lokal yang mendukung. Pemerintah daerah, seperti Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, telah mengimplementasikan kebijakan yang menyediakan fasilitas ibadah, sertifikasi halal untuk restoran dan hotel, serta promosi destinasi halal melalui berbagai platform. Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023, jumlah wisatawan Muslim diperkirakan mencapai 140 juta, dengan pengeluaran global mereka mencapai USD 220 miliar, menunjukkan potensi besar bagi destinasi yang mengembangkan pariwisata halal. Data dari Dinas Pariwisata Yogyakarta juga menunjukkan bahwa

jumlah pengunjung pariwisata halal meningkat sebesar 25% dari tahun 2022 ke 2023, sejalan dengan upaya promosi dan peningkatan fasilitas yang dilakukan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian oleh Alfadri dan Novianti (2024) menegaskan bahwa sinergi antara stakeholder quadruple helix dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata halal.

Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, daerah-daerah seperti Yogyakarta dapat memanfaatkan peluang ini untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap ada, termasuk perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata halal. Dengan mengatasi tantangan ini, pengembangan pariwisata halal diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi utama bagi wisatawan Muslim di dunia.

Pariwisata halal digunakan oleh sebagian orang karena kualifikasi khusus pada produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk wisata, jasa wisata, objek wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal tidak begitu berbeda dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada sebagian besar pariwisata umum, juga tidak bertentangan dengan nilai dan etika syariah. (H. Faizul Abrori, Juni 2020). Dengan tren pariwisata halal kota Yogyakarta mampu menarik wisatawan muslim dengan

pengembangan pariwisata halal yang tidak hanya sekedar menyediakan fasilitas ibadah ataupun makanan halal tapi juga dengan integrasikan nilai-nilai keislaman dengan perpaduan kearifan lokal budaya Jawa. Untuk membangun Kota Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata halal yang terkenal maka perlu adanya kontribusi dari berbagai pihak quadruple helix terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan di Kota Yogyakarta.

Unsur quadruple helix berasal dari triple helix dengan unsur akademisi, bisnis, dan pemerintah yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur yaitu komunitas menjadikan quadruple helix mengakomodasi perspektif masyarakat. Dengan menambahkan stakeholder tambahan pemerintah, pengusaha, akademisi, dan Masyarakat ke dalam sebuah kegiatan menjadikan sebuah sinergitas antara masing-masing stakeholder sebagai penggerak konsep quadruple helix pada penelitian ini (Alfadri, n.d.). Dengan sinergi yang kuat dari keempat sektor ini, bisa membuat pariwisata halal di Kota Yogyakarta dapat terus berkembang dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal. Hubungan pengembangan pariwisata halal dengan quadruple helix merupakan hal yang penting dalam pembahasan ini. Pengembangan pariwisata halal yang dijalankan oleh kolaborasi quadruple helix dapat menjadikan tren pariwisata halal disukai banyak orang dengan meningkatkan kesiapan SDM, infrastruktur, ketahanan sosial budaya Islam dan Jawa, dan menguatkan kebijakan regulasi pemerintah yang sebelumnya masih perlu dievaluasi dalam proses pengembangannya.

Quadruple helix tidak hanya mengoptimalkan sinergitas atau potensi dari segi ekonomi dan teknologi tetapi dapat juga berperan dalam perkembangan sosial, pengentasan ketimpangan serta peningkatan kualitas hidup. Dalam quadruple helix pariwisata dapat terhubung dan saling memberi peran yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata halal mulai dari peran pemernitah, akademisi, pengusaha, dan komunitas/Masyarakat. Model quadruple helix dalam pengembangan pariwisata dapat menekankan dinamika dalam proses inovasi yang bersinergitas dengan akademisi untuk mendukung kinerja pemerintah. Dalam setiap stakeholder mempunyai visi misi dan tujuan yang berbeda tapi dapat memiliki kesamaan dalam kontribusi pada pengembangan pariwisata. Dalam kegiatan menumbuhkan ekonomi yang berkembang yang merupakan hasil dari inovasi yang efektif untuk stakeholder yang merencanakan serta menerapkan model quadruple helix di semua kalangan industry pariwisata, dari mulai skala kecil, menengah, hingga besar (Misbar & Novianti, n.d.). Kolaborasi ini menjadi faktor kunci sebagai upaya pengembangan pariwisata halal dan membantu menciptakan ekosistem pariwisata halal yang komprehensif dan berkelanjutan di kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran masing masing stakeholder quadruple helix secara individu dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana efektivitas kolaborasi antar stakeholder quadruple helix dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi peran dan menganalisis tanggungjawab dari masing masing stakeholder quadruple helix dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengukur efektivitas kolaborasi dan mengidentifikasi faktor pendukung penghambat dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal.

D. Manfaat

Terdapat manfaat penelitian teoritis, praktik, dan akademis yang diperoleh, yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan dan menambahkan pengetahuan dalam bidang pariwisata halal dalam kolaborasi quadruple helix dengan teori efektivitas.
2. Secara praktik, mendukung pengembangan pariwisata halal dan dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi stakeholder quadruple helix.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, maka sistem penulisannya akan dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari skripsi.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI, bab ini membahas tentang Kumpulan teori dan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pada sub bab telaah pustaka berisi jurnal jurnal terdahulu yang relevan dengan skripsi. Sedangkan pada sub bab kerangka teori berisi teori teori yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal dan quadruple helix serta penjelasan metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini meliputi jenis penelitian, Lokasi, waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, serta Teknik penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi hasil dari wawancara dengan stakeholder quadruple helix dan hasil analisis efektivitas kolaborasi dari stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada sub bab Kesimpulan berisi Kesimpulan tentang isi penelitian. Kemudian pada sub bab saran berisi saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Ada beberapa telaah Pustaka yang telah ditemukan yang mirip dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ferri Alfadri dan Dewi Noviantii pada tahun 2024 dengan judul "Sustainable Tourism Development: The Role of Quadruple Helix". penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model quadruple helix dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini juga ingin mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan Masyarakat dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam sektor pariwisata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara keempat stakeholder dalam model quadruple helix sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dimana bahwa penerapan model quadruple helix dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat memberikan manfaat signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Kolaborasi yang efektif antara stakeholder tidak hanya meningkatkan keberlanjutan pariwisata tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mendorong dan memfasilitasi kolaborasi ini dalam pengembangan pariwisata (Alfadri & Novianti, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Vira Oktaviani Rezqy dan Khusnul Fikriyah pada tahun 2021 dengan judul “Peran Quadruple Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kawasan Cisarua-Lembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para aktor quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal di Kawasan wisata cisarua lembang dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran quadruple helix dalam pengembangan wisata halal Kawasan wisata cisarua lembang masih belum berperan optimal dan belum terjalin Kerjasama yang signifikan diantara actor actor quadruple helix (Rezqy & Fikriyah, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfarizi, Rastinia Kamila Hanum, dan Antonia Felicia Jane pada tahun 2023 dengan judul “Model Quadruple Helix Sebagai Prinsip Desain Smart Village Dalam Pengembangan Desa Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam berbagai aspek individu dan sosio professional. Hasil penelitian ini mendapatkan pengolahan holistic desa cerdas merupakan Solusi terbaik untuk menggali potensi desa. Prinsip quadruple helix terbukti efektif dalam mewujudkan konsep desa cerdas di Indonesia. Setiap actor helix harus yang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan desa yang cerdas dan berkelanjutan (Alfarizi et al., n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Misbar dan Dewi Novianti pada tahun 2024 dengan judul “Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Omah Jamu Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model quadruple helix dalam pengembangan desa wisata edukasi omah

jamu di Yogyakarta dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa penerapan model quadruple helix dan kolaborasinya belum sempurna dan masih membutuhkan evaluasi secara berkala guna memastikan tujuan bersama tetap tercapai. Terdapat kurangnya kontribusi aktif dari stakeholder dalam proses pengembangan wisata. Kolaborasi dan dukungan antar stakeholder dapat mengembangkan desa wisata edukasi omah jamu dan juga meningkatkan pendapatan, namun terdapat perbedaan kepentingan masing masing yang menjadi tantangan. Tercapainya tujuan yang sama dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian serta kemampuan masing masing stakeholder karena kerjasama yang efektif antar semua stakeholder quadruple helix menjadi sangat penting untuk menjamin keberadaan kreativitas dan inovasi (Misbar & Novianti, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad arif, Mustapa Khamal Rokan, dan Rahima Kumala tahun 2023 dengan judul “*Quadruple Helix Model in The Development of Halal Micro Business in North Sumatra*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama para pemangku kepentingan dalam pengembangan usaha mikro halal di Sumatera utara Indonesia dengan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian ini terdapat kekurangan sinergian diantara para pemangku kepentingan akibat terdapatnya perbedaan visi, kurangnya komitmen kolektif dan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kurangnya dukungan dari pendanaan perbankan yang berakibat pada perlambatan perkembangan usaha. Penelitian ini membantu dalam membahas entitas pemerintah terhadap bentuk dukungan dalam

pengembangan usaha dodol. Dukungan tersebut meliputi penyederhaan prosedur administrative untuk UMKM, kemudian memfasilitasi kemitraan kolaborasi dengan bank syariah, serta mengoptimalkan proses perizinan usaha dan memfasilitasi pembentukan kelompok UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para pengusaha (Arif et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Ferri Alfadri tahun 2023 dengan judul “Peran Quadruple Helix Dalam Meningkatkan Kreatifitas Dan Inovasi Industry Kreatif Berbasis Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masing masing actor quadruple helix dalam meningkatkan kreativitas dan kinerja inovasi pelaku industry kreatif di Kota Padang Simpuan. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan wawancara dengan setiap actor quadruple helix. Hasil penelitian ini memberikan kerangka konseptual bagaimana kreativitas dapat ditingkatkan melalui 4 pendekatan dan interaksi actor helix untuk meningkatkan kinerja inovasi dalam kerangka kerja, kreativitas merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja inovasi industry kreatif Indonesia (Alfadri, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Wirata, Made Mulia Handayani, dan Made Ayu Desi Geriadi tahun 2023 dengan judul “Kebijakan Pengembangan Ecowisata Berbasis Komunitas Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Quadruple Helix”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis penerapan quadruple helix dalam kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia dengan metode penelitian kualitatis deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak hanya

sebatas keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan tetapi mengandung peran lebih lanjut dari setiap tahapan suatu kegiatan sampai menilai dengan apakah Pembangunan sudah sesuai rencana dan dapat meningkatkan ekonominya. Peran industry dalam ecowisata bertugas dalam peningkatan roda perekonomian daerah melalui pemanfaatan objek wisata untuk mendapatkan benefit yang maksimal dan peran pemerintah serta masyarakat dalam objek wisata agar tetap berkelanjutan (Wirata & Handayani, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chusnul khitam tahun 2022 dengan judul “Kolaborasi Quadruple Helix: Pengembangan Eduwisata Semanggot (Sekarang Edukasi Maggot) Berbasis Potensi Desa”. Penelitian ini bertujuan memberikan ruang masing masing stakeholder untuk saling berkolaborasi dan menjadikan eduwisata ini sebagai potensi desa yang mempunyai nilai ekonomis bagi warga sekitar dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan keempat actor helix dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder. Dari kolaborasi ini menciptakan inspirasi konsep wisata edukasi yang dapat memaksimalkan potensi desa terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat desa (Khitam, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi, Fitra Lestari, Zulkifli, Muhammad Dzaky Adzkia, Abu bakar Abdulhamid, dan Tengku Nuraiman pada tahun 2025 dengan judul “*Halal Supply Chain Strategy InThe Leather Industry Using the Quadruple Helix Model*”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat beberapa asumsi strategis dan menerapkan metode strategic assumption surfacing and testing dengan metode

kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan 20 asumsi strategis yang dibagi menjadi 4 bagian sehingga dapat mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan berbagai strategi untuk meningkatkan sertifikasi halal dan mempertimbangkan kepastian dan kepentingan lainnya. Terdapat 11 asumsi strategis utama yang telah di pilih untuk focus utama penelitian (Lestari et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim Marpaung, Sugianto, dan Ulfa Yolanda pada tahun 2021 dengan judul “Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Industry Pisang Sale Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan representasi yang menyeluruh tentang sinergi pemangku kepentingan sale pisang kabupaten aceh Tenggara dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini terdapat permasalahan terkait sinergi dalam pengembangan industry karena belum adanya kesamaan visi para para pelaksana kepentingan dan kerja sama serta koordinasi antara industry, pemerintah dan pemangku kepentingan (Marpaung & Yolanda, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Syaripuddin tahun 2021 dengan judul “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kabupaten Aceh Tengah)”. Dari hasil penelitian ini adalah strategi dalam pembangunan destinasi pariwisata halal berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan perekonomian yang paling di prioritaskan merupakan peningkatan fasilitas, infrastruktur dan sinergisitas antar pemerintah, pelaku usaha, sosialisasi, dan promosi. Perluasan investasi pada bidang pariwisata halal,

pengembangan produk khas masyarakat gayo, kemudian pengembangan produk pariwisata serta sertifikasi pelaku usaha (SYARIPUDDIN, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Yohan Fitriadi dan Rahmi Fahmy tahun 2022 dengan judul “Kolaborasi Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan Smart City: Sebuah Tinjauan Teoritis”. Penelitian ini bertujuan membedakan persamaan dan perbedaan dalam visi kota cerdas dalam peranannya dalam stake holder tersebut dengan metode penelitian analisis kritis sebagai dasar proses penelitian. Ada beberapa hasil penelitian, yaitu a.) Implikasi dari pemahaman kolaborasi yang dilakukan antar helix dalam mendukung pengembangan kota pintar. b.) Evaluasi proses serta melihat Gambaran utuh bagaimana setiap helix memiliki peranan vital dalam pengembangan smart helix. c.) pengetahuan dan keahlian stakeholder dapat melibatkan quadruple helix untuk manfaat banyak pihak (Fitriadi & Fahmy, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imron tahun 2020 dengan judul “Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inspirasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas di Desa Palaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk Kerjasama kolaboratif antar elemen quadruple helix di desa palaan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder, terutama kepada Masyarakat yang di posisikan sebagai objek suatu kebijakan (Imron, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Emilia Fitri tahun 2023 dengan judul “Pemetaan Potensi Pariwisata Di Kota Yogyakarta Dalam Rangka Mewujudkan

Pariwisata Berkelanjutan”. Penelitian ini focus pada pemetaan aspek pendukung dan potensi pariwisata yang ada di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil sebagai berikut: Infrastruktur, pemerintah perlu meningkatkan kualitas infrastruktur di kota yogyakarta seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum. Teknologi informasi, untuk mempromosikan pariwisata dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pariwisata dan perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta. Keberlanjutan, aspek lingkungan dan sosial perlu menerapkan prinsip – prinsip keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta. Keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah hal yang penting dalam pengembangan pariwisata dan pemerintah perlu menjaminnya. Kolaborasi, dari berbagai pihak merupakan hal yang penting dalam pengembangan pariwisata di kota Yogyakarta. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang menuju destinasi wisata. Meningkatkan sarana dan prasarana, toilet, tempat sampah, dan fasilitas lainnya. Meningkatkan kualitas layanan pariwisata, transportasi, akomodasi, dan kuliner (Fitri, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Ainur Ropik dan Afif Musthofa Kawwami tahun 2022 dengan judul “Analisis Wacana ‘Pariwisata muslim *friendly*’ dalam perspektif politik ekonomi islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang wacana pariwisata muslim *friendly* dalam sudut pandang politik ekonomi islam. Metode yang penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Hasil penelitian ini adalah wacana pariwisata muslim *friendly* menimbulkan konflik di

beberapa wilayah di Indonesia salah satunya Sumatera utara karena pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan tidak bisa melakukan pendekatan dengan cata ajakan/motivasional kepada masyarakat (Ropik & Kawwami, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ela Pratiwi tahun 2016 dengan judul “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden 100 orang dan hasil dari penelitian ini disampaikan sebagai berikut: Indikator produk destinasi, yaitu; 36% responden tidak paham mengenai konsep wisata halal. 35% responden merasa sedikit paham. 70% dari total responden menyetujui bahwa letak objek wisata di kota Yogyakarta strategis. 64% responden setuju dengan sudah adanya ketersediaan penginapan syariah di kota Yogyakarta. Sebagian responden, 54% menyetujui ketersediaan restoran halal yang sudah memenuhi kebutuhan wisatawan di kota Yogyakarta. Jenis – jenis atribut wisata halal; fasilitas ibadah, produk halal, moral keislaman, tidak terdapat alkohol dan aktivitas perjudian. 60% responden setuju dengan ketersediaan tempat ibadah. 64% responden setuju dengan sudah terpenuhinya ketersediaan hiburan dengan konsep syariah. 52% responden setuju dengan pemenuhan fasilitas yang memadai di setiap destinasi bagi wisatawan. Indikator kualitas pelayanan, yaitu; 63% responden merasa pelayanan sudah sesuai dengan syariat islam. 65% responden setuju adanya pelayanan complain dengan baik. 64% responden setuju dengan adanya staf destinasi yang berjaga untuk membantu wisatawan mengalami kebingungan saat berkunjung. 59% responden setuju dengan kesopanan dan keramahan staf. 66% responden setuju dengan

pemahaman staf terkait destinasi dan terindikasi bahwa sudah terpenuhinya kepuasan kesopanan dan keramahan staf. Atribut – atribut wisata syariah yang diperlukan. Kota Yogyakarta sudah lumayan banyak yang menerapkan konsep wisata syariah, yaitu toilet Wanita dan pria yang sudah dipisahkan, tidak ada penjualan alcohol disetiap destinasi dan hotel (kecuali hotel berbintang yang sudah mendapatkan izin) dan Lembaga yang bertugas khusus untuk mengecek halal atau tidaknya suatu produk yang dikonsumsi (Pratiwi, 2021).

B. Landasan Teori

1. Quadruple Helix

Pengembangan model quadruple helix yang memasukkan masyarakat sipil sebagai helix keempat karena memiliki latar belakang yang cukup menarik bagi Etzkowitz dan Leydesdorff. Sebelumnya, terdapat model triple helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995, yang menggambarkan hubungan dinamis antara pemerintah, akademisi, dan industri sebagai pendorong kewirausahaan, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sebelum munculnya quadruple helix, telah ada model quintuple helix yang mengangkat perbincangan mengenai transisi sosial-ekologis dalam masyarakat dan ekonomi abad ke-21. Model ini berupaya untuk mengedepankan perspektif yang lebih peka terhadap isu-isu ekologi dalam diskusi terkait inovasi dan produksi. Namun, quintuple helix kurang mendapatkan perhatian luas, karena hubungan antara helix kelima, yaitu lingkungan alami, dengan keempat helix lainnya menghadapi tantangan konseptual. Sebagian

besar model quintuple helix juga memiliki landasan pemikiran teoritis yang sejalan dengan model quadruple helix (Cai & Lattu, 2022).

Menurut pemikiran carayannis dan campbell, triple helix menyampaikan model inti dasar inovasi untuk “ekonomi pengetahuan”. Quadruple helix untuk menggambarkan “Masyarakat pengetahuan” dan “demokrasi pengetahuan”. Sedangkan quintuple helix mengangkat pada “ekologi sosial, interaksi Masyarakat-alam, dan transisi sosio ekologis” seperti berhubungan dengan persepsi yang muncul “semakin meningkatnya kesadaran public terhadap inovasi yang bertanggung jawab secara sosial dan peran Masyarakat sipil dalam pengembangan sains dan teknologi dalam kebijakan pemerintah, orang akan cenderung menganggap model quadruple helix lebih tepat waktu dan cocok untuk mengatasi fitur fitur baru masyarakat (Miller et al. 2018; De oliviera Monteiro dan Carayannis 2017).

Asal usul konsep quadruple helix berasal ketika Carayannis dan Campbell ingin membangun pandangan dan visi yang lebih berorientasi, mengatasi tantangan, dan memperkenalkan pemecahan masalah yang tertarik pada solusi berkelanjutan, yang menitikberatkan pada perspektif pembangunan berkelanjutan yang menyatukan antara inovasi, kewirausahaan, dan demokrasi. Model quadruple helix pada awalnya disajikan dalam buku “*Knowledge creation, diffusion and use in innovation networks and knowledge cluster*” dan kemudian digabungkan dalam artikel yang berjudul “*Mode 3 and quadruple helix: Toward a 21st – century fractal innovation ecosystem*”. Carayannis dan Campbell mengembangkan model quadruple helix dengan

menambahkan helix keempat yang diartikan sebagai masyarakat sipil dan public berbasis media dan budaya. Helix keempat ini diartikan sebagai masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki ekonomi yang modern selain dari akademisi, industry, dan pemerintah pengetahuan mengalir ke semua bidang Masyarakat serta ekosistem inovasi (Cai & Lattu, 2022).

Dasar pemikiran model quadruple helix, ada 3 aspek yang menjadi fondasi model quadruple helix. Pertama, demokrasi atau demokrasi pengetahuan yaitu dimensi penting dalam memahami konteks saat pelaku inovasi berinteraksi satu sama lain untuk membuat pengetahuan dan inovasi. Hal ini berkaitan dengan proporsi Campbell pada jurnal yang berjudul "*Global quality of democracy as innovation enabler: measuring democracy for success*". Dalam demokrasi ini merupakan kerangka kerja sistem inovasi quadruple helix yang menempatkan pengguna inovasi utamanya dan mendorong pengembangan inovasi yang relevan bagi Masyarakat sipil. Kedua, model quadruple helix berpusat pada produksi pengetahuan mode 3 yang memperluas produksi pengetahuan mode 1 dan mode 2 sebagaimana dikategorikan oleh Gibbon et al. 1994. Carayannis dan Campbell mendefinisikan produksi pengetahuan mode 3 sebagai pusat atau simpul dari ekosistem inovasi abad ke 21 yang sedang berkembang, bertemu, dan berinteraksi untuk mendorong kreativitas, menghasilkan penemuan dan mempercepat inovasi ilmu pengetahuan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan sektor public maupun swasta. Daya saing dan keunggulan ditambahkan dan ditentukan oleh kapasitas adaptifnya untuk menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai

pengetahuan dan mode inovasi. Ketiga, interaksi quadruple helix dapat dilihat sebagai pendorong dan pelaku ekosistem kewirausahaan kooperatif regional yang di konseptualisasikan sebagai multilateral dan asset berwujud dan tidak berwujud yang dinamis (Cai & Lattu, 2022).

Model inovasi quadruple helix bisa digunakan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menciptakan inovasi yang berkelanjutan (Alfarizi et al., n.d.). Model yang dikembangkan oleh Carayannis dan Campbell ini memiliki 4 unsur atau stakeholder yang bekerja sesuai dengan perannya, yaitu:

a. Akademisi

Akademisi pada model quadruple helix berperan sebagai konseptor. Akademisi dalam hal ini merupakan akademisi yang memiliki sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan kondisi yang ada. Akademisi dapat berperan memberikan pandangan dan analisis berdasarkan data lapangan mengenai tingkat perkembangan dan juga formula tepat memajukan perekonomian melalui berbagai penelitian, analisis, serta pengembangan sumber daya manusia (Ariwibowo, 2019).

Menurut Halibas et.al (2017) akademisi berperan sebagai berikut:

- 1) Diskusi akademik terutama berfokus pada inovasi untuk melakukan komersialisasi penelitian dan kemitraan dengan sektor publik.

- 2) Selain sebagai sumber pengetahuan, lembaga akademik juga bertanggung jawab untuk tidak hanya keterampilan kerja, tetapi juga keterampilan inovatif, kewirausahaan, dan giat sebagai bagian dari nilai nilai inti organisasi.
- 3) Institusi akademisi memiliki fungsi sebagai standarisasi dalam penelitian dan pengembangan perekonomian.
- 4) Sebagai lembaga yang dapat memberikan sertifikasi terhadap penelitian.

b. Pelaku Bisnis

Pelaku Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambahan dan mempertahankan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler menghadirkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis berperan sebagai enabler yang mendukung perubahan pada sumber daya manusia, proses bisnis dan produk yang dihasilkan ke era digital. Dalam penelitian ini pelaku bisnis berperan sebagai penyedia fasilitas wisata yang didukung oleh pemerintah.

c. Komunitas

Komunitas merupakan orang orang yang memiliki minat yang sama dalam mempengaruhi keberlanjutan pariwisata halal serta berhubungan dengan peningkatan potensi yang akan dikembangkan. Bertindak seperti perantara atau sebagai penghubung antar pemanku kepentingan yang membantu masyarakat dalam mencapai keseluruhan proses dan melancarkan adopsi dalam proses ekonomi.

Swarbroonke (1999) mengklasifikasikan komunitas lokal menjadi beberapa kelompok:

- 1) Masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan strategis dan keputusan taktis dalam kaitannya dengan pariwisata di daerah mereka.
- 2) Masyarakat memiliki hak veto atas semua kebijakan perekonomian dan keputusan yang berda ditangan badan badan sektor public.
- 3) Masyarakat menetapkan prioritas dan parameter untuk kebijakan dan atau keputusan sektor public.
- 4) Masyarakat diizinkan untuk memilih kebijakan atau sinergi dari sejumlah kecil pilihan yang telah di dihasilkan oleh para pembuat kebijakan sektor public.

d. Pemerintah

Pemerintah adalah salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus sebagai pengawas. Dalam buku Ilmu Pemerintahan Prof. Inu Kencana, ada beberapa definisi tentang pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut W.S. Sayre (1960), pemerintah merupakan organisasi milik negara yang menjalankan dan menunjukkan kekuasaannya.
- 2) Menurut C.F. Strong (1960), pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjaga kedamaian dan keamanan negara. Pemerintah juga harus mempunyai kekuatan dalam lingkungan legislatif, lingkungan militer, dan kekuatan finansial.

- 3) Menurut Charles Merriam (1960), pemerintah mempunyai tujuan yang meliputi *external security, internal order, justice, general welfare, freedom*.
- 4) Menurut Samuel Edward finer (1974), pemerintah harus memiliki kegiatan yang terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), serta cara, metode dan sistem (*manner, method, system*) dari pemerintah kepada Masyarakat.
- 5) Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1984), pemerintah mempunyai tugas untuk menjalankan tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintah, Pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan fungsi dari pemerintah adalah melakukan pengaturan, pembinaan Masyarakat, kepolisian, dan peradilan.

Secara keseluruhan pemerintahan merupakan sekumpulan orang orang yang dapat melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara pemerintah dengan Masyarakat, antara departemen dan unit dalam pemerintahan itu sendiri. Thomas R. Dye (1989:1) mengatakan bahwa sebuah tindakan kebijakan dari pemerintah bisa melakukan sesuatu atau tidak sama sekali karena pemerintah mempunyai kekuasaan yang membawahi posisi militer, polisi, jaksa dan berbagai pengamanan serta ketertiban yang dapat mencegah dari segala tindak kriminalitas dan jika tidak melakukan sesuatu maka akan dipandang sebagai tindakan perlindungan dengan arti materialistik (Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si., 2019).

2. Pariwisata Halal

Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kementrian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2012). Wisata halal adalah pariwisata yang melayani, menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Dalam hal ini destinasi yang mengusung prinsip syariah yaitu tidak melanggar syariat. (H. Faizul abrori, Juni 2020). ada 4 indikator dalam penilaian wisata halal menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), yaitu Accessibility (aksesibilitas), Communication (komunikasi), Environment (lingkungan), dan service (layanan). Dalam konsep wisata syariah dalam fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 dan praktik layanan pengelola wisata konvensional terhadap wisatawan muslim ada 2 perspektif yang harus dipahami, yaitu pertama, wisata syariah sebagai sebuah konsep ideal yang ditawarkan kepada wisatawan, baik muslim maupun nonmuslim. Kedua, wisata syariah sebagai bagian pariwisata yang telah dipraktekkan oleh pelaku usaha pariwisata.

Konsep halal dipandang menjadi 2 perspektif, yaitu perspektif agama dan perspektif industry. Dalam prespektif agama hukum memakan apa saja oleh konsumen muslim sesuai keyakinan ini akan membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Dari prespektif industry konsep halal dapat dijadikan suatu peluang bisnis yang target konsumennya Sebagian banyak adalah muslim dan diperlukan jaminan kehalalan produk untuk meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*.

Arti dari pariwisata halal ini lebih luas dari istilah wisata religi yang wisatanya hanya didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Menurut *World Tourism Organization* (WTO), konsumen pariwisata halal ini bukan hanya wisatawan muslim saja tapi juga wisatawan nonmuslim yang ingin menikmati kearifan lokal (Jaelani, 2017). Kriteria umum pariwisata halal ini ada 4, yaitu; pertama, mempunyai orientasi pada kemaslahatan umum. Kedua, mempunyai orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, dapat menghindari kemusyrikan dan khufarat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, dapat menjaga kenyamanan dan keamanan. Keenam, bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Ketujuh, dapat menghormati nilai sosial budaya serta kearifan lokal setempat (Syahril, n.d.).

Tabel 2.1 Perbedaan Pariwisata Konvensional Dan Pariwisata Halal

No	Item Perbandingan	Pariwisata Konvensional	Pariwisata Halal
1.	Objek	Alam, budaya heritage, kuliner	Alam, budaya, heritage, kuliner dengan fasilitas yang sesuai prinsip syariah
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi semata mata hanya untuk hiburan	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.
4.	Guide	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata.	Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religiusitas wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk

No	Item Perbandingan	Pariwisata Konvensional	Pariwisata Halal
			kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5.	Fasilitas ibadah	Hanya pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian dari paket hiburan
6.	Kuliner	Umum	Spesifik yang sesuai dengan prinsip syariah
7.	Relasi dengan Masyarakat di lingkungan objek wisata	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Intergrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah
8.	Agenda perjalanan	Setiap waktu	Memperhatikan waktu

Sumber: (Syahril, n.d.) *Model Penta Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatera Barat.*

Pariwisata halal diartikan sebagai perhotelan dan pariwisata yang diciptakan sesuai dengan ajaran islam. Memanfaatkan pariwisata halal bisa menaikkan permintaan layanan wisata ramah muslim yang membeikan rasa aman, pariwisata halal juga bisa berdampingan dengan yang lain yang sifatnya saling melengkapi yaitu membuat produk sendiri. Pariwisata halal mempunyai kata kunci yaitu pelayanan, bagaimana penyelenggara memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik bagi wisatawan yang memilih halal sebagai gaya hidupnya dari mulai makanan, hotel, kemudahan dalam ibadah dan lainnya. Pariwisata halal yang berkaitan dengan gaya hidup dimana mengembangkan pariwisata halal akan sulit jika hanya berdasarkan ideologi.

Pariwisata halal adalah bentuk strategi bisnis yang bisa meraih keuntungan di pasar (Syahrial, n.d.).

3. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu unsur pokok yang digunakan untuk menghasilkan tujuan dan susunan yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau kelompok (Martauli S et al., 2022). Konsep efektivitas yang luas yang mencakup Sebagian faktor internal dan eksternal suatu organisasi atau kegiatan. Efektivitas mengarah pada hubungan antara keluaran atau hasil yang dicapai atau yang benar benar dicapai antara tujuan dan hasil yang di tetapkan atau diharapkan dalam rencana suatu kegiatan atau kelompok dikatakan efektif jika output yang dihasilkan memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas secara umum dapat dilihat dari Tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Menurut S.P Siagian;2001, efektivitas adalah menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas waktu yang telah ditentukan untuk menciptakan beberapa barang atau jasa yang diberikan. Berikut ada beberapa yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu:

a. Teori Yang Mengacu Pada Efektivitas.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi atau kegiatan lainnya, yaitu:

- 1) Gibson, Donnely, Nancevich (1997:27-29), mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah pendekatan tujuan dan sistem. Suatu sistem atau kelompok dapat dilihat sebagai sistemn yang

bergerak saling bergantung yang bekerjasama untuk mencapai tujuan Bersama. Menurut Gibson teori sistem mementingkan elemen inti input-proses-output yang bertujuan guna melindungi dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar untuk mendukung suatu organisasi atau kelompok. Teori ini mendeskripsikan hubungan antara organisasi dengan sistem yang lebih luas saat organisasi tersebut menjadi bagiannya. Inti teori sistem adalah sebagai berikut:

- a) Kriteria kinerja harus mencerminkan siklus proses input-output, bukan output sederhana.
- b) Kriteria kinerja harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas saat organisasi itu berada.

Jadi, efektivitas organisasi merupakan konsep yang luas yang mana mencakup beberapa konsep komponen dan peran manajemen serta menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagian.

2) Robbin (199:58), membagikan empat pendekatan untuk mengukur efektivitas untuk organisasi, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan strategi konstitue, dan pendekatan nilai kompetitif.

Robbin berpendapat bahwa pendekatan sistem mementikan bahwa untuk peningkatan kelangsungan hidup organisasi perlu memperhatikan sumber daya manusia, melindungi diri secara internal dan meningkatkan

penggunaan struktur dan teknologi organisasi untuk berintegrasi dengan lingkungan. Dimana organisasi membutuhkan dukungan terus menerus untuk bertahan hidup. Dari pendekatan ini penentuan efektivitas organisasi berdasarkan hasil pencapaian tujuan tidak sempurna, sehingga evaluasi efektivitas organisasi harus didasarkan pada kemampuannya untuk menerima input, memproses input, menghasilkan dan memelihara output stabilitas seimbang. Input dalam arti disini merupakan semua jenis sumber daya input yang digunakan didalam proses tertentu untuk menghasilkan output. Input tersebut berupa bahan mentah proses, manusia (tenaga kerja, pengetahuan, keterampilan), infrastruktur (bangunan dan peralatan), teknologi (perangkat keras dan perangkat lunak).

b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi, antara lain:

- 1) Karakteristik organisasi, yang mempunyai hubungan dengan sifatnya yang sifatnya relative tetap untuk menempatkan orang dalam posisi suatu organisasi yang dinamakan struktur. Dalam struktur ada bagian dari hubungan yang rata rata tetap sebagai penentuan pola interaksi dan perilaku dalam arahan tugas.
- 2) Fitur lingkungan, ada dua aspek, pertama lingkungan eksternal adalah lingkungan yang ada di luar batas organisasi dan mempunyai pengaruh

besar kepada organisasi dan pengambilan Keputusan serta operasional.

Kedua, lingkungan internal sebagai iklim organisasi atau lingkungan umum dalam lingkup organisasi.

- 3) Karakteristik karyawan, yang dapat mempengaruhi kinerja pada beberapa aspek. Saat sebuah organisasi ingin mencapai tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen, saat menerapkan kebijakan serta praktik manajemen perlu focus pada orang yang menjalakkannya, bukan hanya focus pada strategi dan mekanisme kerja. Saat mekanisme ini dijalankan maka sudah termasuk menetapkan tujuan strategis, menemukan dan menggunakan sumber daya, menciptakan lingkungan pencapaian, proses komunikasi dan lain lain.

c. Aspek Efektivitas

Aspek yang harus dicapai saat dalam kegiatan, diantaranya:

- 1) Aspek regulasi atau temporer, aspek ini guna menjaga kelangsungan kegiatan sesuai dengan perintah atau peraturan agar aktivitas bisa disebut efektif.
- 2) Aspek tugas, suatu individu atau organisasi bisa disebut efektif bila dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Aspek rencana atau program, kegiatan bisa dikatakan efektif jika mempunyai rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang dapat di capai.
- 4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, adalah tujuan yang bisa dicapai bila Tindakan yang mengarah pada hasil dan proses yang direncanakan.

d. Pendekatan Untuk Mencapai Efektivitas

Dari pandangan martin dan lubis (1987;56), ada beberapa perbedaan pendekatan dalam mengukur efektivitas

- 1) Pendekatan objektif, mengukur tujuan dalam efektivitas dimuali dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur efisiensi, Tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pendekatan ini mengukur seberapa baik organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
- 2) Pendekatan pasokan (pendekatan sumber daya sistem), pendekatan ini mengukur efisiensi dari keberhasilan organisasi dalam memperoleh berbagai sumber daya yang diberikan.
- 3) Pendekatan proses (*internal process approach*), pendekatan ini tidak dilihat dari lingkungan organisasi tapi pada kegiatan yang dilakukan sumber daya organisasi. Pendekatan ini digunakan oleh para pendukung pendelatan non klasik (hubungan manusia) yang mempelajari hubungan antara efektivitas dan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi.

e. Konsep Efektivitas

Gibson (1985: 27-30) mengkaji konsep efektivitas organisasi menjadi 3 perspektif, yaitu:

- 1) Efektivitas individu, efektivitas ini menekankan penyelesaian tugas dan tanggung jawab individu sebagai karyawan organisasi.

- 2) Efektivitas kelompok, efektivitas kelompok ini mengawasi kinerja yang dapat diberikan oleh kelompok yang terdiri dari para pekerja individu.
- 3) Efektivitas organisasi, efektivitas ini merupakan gabungan dari efektivitas individu dengan efektivitas kelompok yang dapat melebihi tingkat efisiensi yang tinggi.

f. Kriteria Efektivitas

Dari S.P. Siagan (2008:77) kriteria atau ukuran untuk mencapai atau tidak tercapainya tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) *Achievable goals*, dibuat agar karyawan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan saat melakukan tugas dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Penggunaan strategi yang berorientasi pada tujuan, penggunaan ini untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang solid, konsisten dengan tujuan dan strategi dapat menghubungkan tujuan dengan pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Membuat perencanaan yang matang, memberikan putusan terkait kegiatan apa yang akan dilakukan.
- 5) Dalam hal pemrograman yang benar, rencana masih perlu ditentukan dengan benar karena jika tidak dilakukan dengan benar maka para pelaksana akan kekurangan intruksi untuk melakukan Tindakan.
- 6) Untuk menyediakan kesempatan kerja dan infrastruktur, salah satu ukuran efektivitas yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

- 7) Implementasi yang efektif dan efisien sebaik apapun suatu program saat tidak dilakukan secara efektif dan efisien, maka tidak akan mencapai tujuannya.
- 8) Penerapan sistem pemantauan dan pengendalian agar bersifat instruktif.

g. Indikator Efektivitas

Pandangan Prawirosnetono Barnard (2008:27) bahwa efektifitas merupakan keadaan dinamis, dimana pemenuhan tugas dan tugas adalah proses yang konsisten dengan tujuan yang ditetapkan dan usulan kebijakan program. Indikator untuk sebuah ukuran program yang efektif yaitu, sebagai berikut: penyediaan sarana dan prasarana, efektivitas tujuan program, efektivitas individu dalam penerapan kebijakan program, efisiensi unit kerja dalam penerapan kebijakan program, efisiensi operasi program, kejelasan tujuan program, memperjelas strategi untuk mencapai tujuan program, desain kebijakan program yang kuat, pemrograman yang benar, efisiensi operasi program dan efektivitas tujuan program. (Rahma, n.d.).

4. Hubungan Teori Efektivitas dengan Subjek dan Objek Penelitian

a. Teori efektivitas

Teori efektivitas ini mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efektivitas ini mencakup pencapaian

hasil yang diharapkan dan relevansi Tindakan yang diambil dalam konteks tujuan yang lebih luas. Aspek yang diperhatikan, meliputi:

- 1) Pencapaian tujuan. Seberapa baik suatu organisasi atau sistem dapat mencapai tujuan telah ditetapkan,
- 2) Penggunaan sumber daya. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan,
- 3) Evaluasi dan penyesuaian. Kemampuan untuk mengevaluasi hasil dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas.

b. Hubungan teori dengan subjek penelitian

1) Peran masing masing stakeholder

Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal. Teori efektivitas dapat digunakan untuk menilai seberapa baik masing masing stakeholder menjalankan perannya dan berkontribusi terhadap tujuan bersama.

2) Koordinasi dan sinergi

Efektivitas kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal. Teori efektivitas membantu dalam menganalisis bagaimana koordinasi dan sinergi antar stakeholder dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

c. Hubungan dengan objek penelitian

Identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas kolaborasi seperti kurangnya koordinasi, sumber daya atau kebijakan.

Dengan menerapkan teori efektivitas, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika antar stakeholder dan bagaimana mereka dapat bekerja sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal di kota yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran dan kontribusi stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan teori efektivitas sebagai kerangka analisis untuk menilai kolaborasi antar stakeholder quadruple helix dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal. Dan jenis penelitian yang digunakan berupa studi dokumen/teks (*document studies*), dan wawancara terpusat (*focused interviews*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta yang terbagi menjadi 4 stakeholder quadruple helix, yaitu pelaku bisnis yang berada di Jogja Halal Tour, komunitas yang berada di Generasi Pesona Indonesia Jogja, akademisi yang berada di pusat studi pariwisata Universitas Gadjah Mada dan FBE Universitas Islam Indonesia, pemerintah yang berada di kantor dinas pariwisata kota Yogyakarta.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Oktober 2024 – Desember 2024

D. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para stakeholder quadruple helix. Dan objek penelitian ini adalah peran dan kontribusi stakeholder quadruple helix dengan teori

efektivitas dalam pengembangan pariwisata halal yang di jalankan oleh para stakeholder quadruple helix.

E. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang meliputi wawancara bersama stakeholder quadruple helix. Sumber data sekunder meliputi dokumen terkait, jurnal, dan portal berita.

F. Teknik Pengumpulan Data

Informan dalam wawancara ini sebagai berikut, yaitu Pelaku Bisnis (*Manager* Jogja Halal Tour), Komunitas (Ketua Generasi Pesona Indonesia Yogyakarta (GenPI). Akademisi (Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM dan Dosen FBE UII), Pemerintah Dinas Pariwisata (Kepala Bidang Industri).

G. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan dalam studi ini wawancara yang mencakup pertanyaan pertanyaan seperti aksesibilitas, kualitas, layanan, dan fasilitas yang tersedia untuk wisatawan muslim, wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang berupa 4 tahap, yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Stakeholder Quadruple Helix

1. Pelaku Bisnis Jogja Halal Tour

Bisnis Jogja Halal Tour adalah layanan aktivitas tour travel yang mengcover semua kebutuhan pelanggan yang terencana baik dengan panduan profesional dan ramah, serta penginapan yang sempurna untuk menikmati liburan. Jogja halal tour telah berdiri sejak tahun 2012 sempat terhenti ditahun 2020 karena covid-19 dan mulai beraktivitas di tahun 2022. Jogja halal tour menyediakan perjalanan yang sesuai dengan prinsip syariah islam dan tak terlupakan serta inspiratif dengan memastikan kebahagiaan dan kenyamanan yang telah diberikan.

2. Komunitas Generasi Pesona Indonesia Jogja

GenPi jogja adalah komunitas yang didirikan oleh kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif republic Indonesia sebagai Upaya dalam pengembangan pariwisata Indonesia masa jabatan Menteri pariwisata republic Indonesia Arief yahya. GenPi di deklarasikan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 06 Agustus 2016 dengan mengikuti model komunitas wonderful Lombok sumbawa yang di kenal di Lombok NTB. Komunitas GenPi merupakan komunitas yang berisi aktivis blogger, fotografer, videographer, traveller, dan lain sebagainya.

Pada 6 oktober 2024 menteri menparekraf sandiaga uno memberikan pujian kepada komunitas Generasi Pesona Indonesia (GenPi) yang konsisten dalam mempromosikan pariwisata serta ekonomi kreatif melalui media sosial. Melalui kampanye #DiIndonesiaAja, GenPi telah membantu meningkatkan kesadaran bagi wisatawan Nusantara untuk menjelajahi destinasi lokal, dan tahun 2024 Kemenparekraf menargetkan untuk penciptaan desa wisata serta desa kreatif yang akan menjadi penggerak pariwisata berbasis komunitas.

Komunitas genpi sempat diberi nama Generasi Wonderful Indonesia (GenWin) atau Generasi pemenang (Generasi Winner), namun disepakati menjadi nama GenPi karena identik dengan brand yang diusung oleh kementerian pariwisata melalui divisi pariwisata Nusantara (parnus). Pengusulan pembentukan GenPi pada awalnya berasal dari tim percepatan pariwisata halal Indonesia yang pada saat itu pariwisata halal menjadi salah satu program prioritas. Tanggal 03 oktober 2016 *grand launching* di kunjungi oleh Menteri pariwisata RI Arief Yahya, *grand launching* Genpi di Lombok, sumbawa tepat di hotel Lombok raya mataram, Lombok. Sekitar 250 netizen yang mempunyai *passion* dibidang pariwisata hadir saat *grand launching*, terdapat juga Gubernur NTB periode 2013-2018 (TGB Zainul Majdi), Kepala Dinas pariwisata provinsi NTB (Lalu M Faozal), Ketua BPPD NTB Afan Ahmad dan Ketua Umum GenPi Lombok sumbawa Siti Chotijah. *Grand launching* juga disaksikan oleh Taufan Rahmadi yang merupakan anggota tim percepatan pariwisata halal KEMENPAR RI dan perwakilan dari 20

komunitas beserta sponsor seperti telkomsel, PT. Newmont dengan berbagai media lokal maupun nasional.

Pada tahun 2016 GenPi menjadi ujung tombak bagi pemenang Indonesia pada kompetisi *World halal travel awards 2016* Abu Dhabi, hasil *World halal travel awards 2016* Abu Dhabi melalui Kerjasama dari berbagai pihak khususnya KEMENPAR RI membawa 12 piala dari 16 kategori nominasi, sebelumnya pada tahun 2015, Indonesia meraih 3 piala pada *awards* pariwisata halal tertinggi di dunia.

Pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan 2 nominasi *awards* video wonderful Indonesia yang dilaksanakan dalam *United nations world tourism organization 2017* dengan nominasi 'Best Video' dan 'miss grand internasional. Pada tahun 2018 GenPi menjadi tamu Istimewa pada rapat koordinasi nasional pariwisata (Rakornaspar) I 2018 di nusa dua, bali dengan pembahasan destinasi digital dan nomadic tourism. Hingga akhir tahun 2018 GenPi menjadi punggawa di 68 destinasi digital yang dinikmati sampai wisatawan mancanegara. Sejak 2016-2019 terdapat 48 penghargaan yang diraih oleh Indonesia, seperti kompetisi internasional World halal tourism, *United nations world tourism organization*, the best island in the world. GenPi telah menjalin Kerjasama dan memiliki jejaring lokal maupun internasional yang luas, antara lain DESMA Center dan ASEAN Centre of Biodiversity (ACB).

3. Akademisi Pusat Studi Pariwisata UGM

Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (PUSPAR UGM) berdiri pada tanggal 23 Juli 1994 dengan nama Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pariwisata Universitas Gadjah Mada, kemudian pada tahun 2001 melakukan perubahan nama menjadi Pusat Studi Pariwisata UGM. Puspar UGM didirikan dari idealisme pimpinan dan sivitas akademika ugm untuk meningkatkan relevansi disiplin ilmu dan bagi pemecahan masalah actual yang di hadapi masyarakat dan negara, membina dan meningkatkan kegiatan bersama dari disiplin ilmu yang dikembangkan di Universitas Gadjah Mada dengan pendekatan yang berorientasi pada problema melalui penelitian antar disiplin.

4. Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

A. Keterangan umum OPD Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

1. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi DIY dan merupakan satu satunya daerah tingkat II yang berstatus kota di antara 4 daerah Tingkat II lainnya yang berstatus kabupaten. Kota Yogyakarta berada ditengah Tengah provinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara; kabupaten sleman, Bagian timur; kabupaten sleman dan Bantul, bagian Selatan; kabupaten Bantul, bagian barat; kabupaten Bantul dan sleman. Wilayah kota Yogyakarta

terbentang antara 110° 24'19" - 110°28'53" Bujur timur dan 7°15' 24" - 7°49'26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata rata 114 m diatas permukaan laut.

2. Keadaan alam

Secara garis besar kontur kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relative datar dan dari utara ke Selatan memiliki kemiringan $\pm 1^\circ$, serta terdapat 3 aliran Sungai yang melintasi kota Yogyakarta, yaitu: sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian Tengah adalah Sungai Code, sebelah barat adalah Sungai Winongo.

3. Luas wilayah

Kota Yogyakarta mempunyai luas wilayah yang tersempit dibandingkan dengan daerah Tingkat II lainnya, yaitu sekitar 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah provinsi DIY. Dengan luas sebesar 3.250 hektar tersebut dibagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, yang dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK 2013) dengan kepadatan rata rata 13.177/Km².

4. Tipe tanah

Kondisi tanah di kota Yogyakarta cukup subur dan sangat memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian ataupun dijadikan wilayah perdagangan, karena disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia volcanic foot plain*) yang garis

besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Namun dari data tahun 1999 menunjukkan penurunan 7,8% dari luas area kota Yogyakarta (3.249,75) yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan.

5. Iklim

Kota Yogyakarta memiliki tipe iklim “AM dan AW” dengan curah hujan rata rata 2.012 mm/tahun dengan 119 hari hujan, suhu rata rata 27,2° C dan kelembapan rata rata 24,7%. Jenis angin yang bertipu pada umumnya merupakan angin muson dan pada musim hujan merupakan angin barat daya dengan arah 220° yang bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau merupakan angin muson Tenggara yang kering dengan arah $\pm 90^{\circ}$ – 140° dengan rata rata kecepatan 5-16 knot/jam.

6. Demografi

Pertambahan jumlah penduduk kota dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang tinggi, pada data akhir tahun 1999 jumlah penduduk kota sebesar 490.433 dan sampai pada akhir juni 2000 tercatat penduduk kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan Tingkat kepadatan rata rata 15.197/km². Rata-rata angka harapan hidup penduduk kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, yaitu laki laki usia 72.25 tahun dan perempuan usia 76.31 tahun.

B. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Dalam peraturan gubernur nomor 112 tahun 2022 dinas pariwisata terdiri dari: a). Kepala dinas; b). secretariat, terdiri atas Subbagian Umum; c). bidang daya Tarik wisata; d). bidang pengembangan sumber daya pariwisata; e). bidang pemasaran pariwisata; f). bidang industri pariwisata; g). unit pelaksana teknis; h). kelompok jabatan fungsional.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas pariwisata kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Berikut tugas dan fungsi, yaitu:

1. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pariwisata.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pariwisata.

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata.
- e. Pengelolaan taman pintar dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- f. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan pengawan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dibidang pariwisata.

D. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

1. Visi

Terwujudnya kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata terkemuka yang bertumpu pada kekuatan dan keunggulan pariwisata lokal serta mampu memperkuat jatidiri, memberikan manfaat yang positif bagi Masyarakat, serta dapat menjadi lokomotif Pembangunan kota Yogyakarta secara menyeluruh.

2. Misi

- a. Mengoptimalkan potensi objek dan daya Tarik wisata yang ada di kota Yogyakarta sebagai asset utawa kepariwisataan.
- b. Membuat perencanaan Pembangunan pariwisata kota Yogyakarta secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian dan pengembangan pariwisata lokal.

- c. Membangun kemitraan yang kondusif antara pemerintah, Masyarakat, dan swasta atau pengusaha dalam mengembangkan pariwisata kota Yogyakarta
- d. Meningkatkan peran aktif dan apresiasi Masyarakat serta swasta atau pengusaha dalam memajukan pariwisata kota Yogyakarta
- e. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata.
- f. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pariwisata bagi kota Yogyakarta.
- g. Menumbuhkan sikap sadar wisata pada semua komponen Masyarakat Yogyakarta
- h. Memberikan pelayanan prima dan menyiapkan sistem informasi pariwisata yang memadai.
- i. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta baik secara material maupun sosial.

B. Hasil Wawancara

1. Pelaku Bisnis Jogja Halal Tour

Wawancara pelaku bisnis Jogja Halal Tour dengan narasumber Bapak Hartanto selaku pendamping operasional-komisaris, wawancara dilakukan di kantor Jogja Halal Tour pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 11.48 WIB. Pelaku bisnis berperan penting untuk memberikan kebebasan kepada

wisatawan dan menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam konteks wisata halal. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan layanan dan produk halal dengan memperhatikan waktu shalat dan memastikan makanan yang disajikan halal meskipun terdapat kendala dalam memenuhi standar halal dari permintaan pelanggan yang melebihi kapasitas yang dapat disediakan oleh partner bisnis ataupun dari Perusahaan itu sendiri. Seperti yang dibahas dalam wawancara Bersama Bapak Hartanto

“kita ya selalu, apa ya Namanya kita kan berbisnis ya itu pokok prioritas kita kan kepada kategori wisatawan yang muslim, nah bukan hal yang apa tidak mungkin kita tidak menerima dari kelompok selain non muslim. Kita selalu mempromosikan hal yang berbeda dari kita malah tour itu. Pertama kita selalu tidak mengesampingkan waktu shalat terus menjanjikan bahwa makanan yang disajikan dalam setiap kegiatan itu halal gitu” ucap bapak Hartanto

Perusahaan Jogja Halal Tour ini juga mengukur kontribusi bisnis terhadap pariwisata halal dengan memastikan pengalaman positif bagi wisatawan serta menjaga kehalalan produk yang ditawarkan.

“jadi kalau menurut kami, yaitu selagi kita berbisnis ada juga pertanggung jawaban lain dan seiritual kita ya, artinya kita kan dalam berbisnis juga pengen barokah kita ya sebagai umat muslim kan. Nah disitu juga kaya ada sinkronisasi terhadap elemen elemen tertentu”ucap bapak Hartanto

Perusahaan Jogja Halal Tour memastikan bahwa setiap wisatawan mengalami pengalaman yang positif dengan menggunakan jasa *tour and travel* Jogja Halal Tour ini.

“orang diluar daerah kadang kalau daerah lain yang mereka jarang atau bahkan belum pernah kan mereka terlalu hati hati, nah dengan adanya

halal tour kita itu menekankan mereka dan memastikan mereka terhadap produk non halal gitu. Karena brand kita bisa menjamin dan memastikan dari mereka datang ke jogja sampai pulang dari jogja itu mereka terjamin kehalalan dalam setiap kegiatan maupun makanan.” Ucap bapak Hartanto

Tujuan Perusahaan adalah mendukung wisatawan muslim dan memastikan aktivitas halal dalam setiap tour dengan pencapaian yang di ukur melalui inovasi dan peningkatan layanan.

“tujuan kita, apa ya tentunya untuk mensupport bagi elemen Masyarakat yang muslim, yakan kami support kesitu dan juga kita menjadi wadah untuk menjamin dan memastikan aktivitas halal dalam setiap tour gitu. Dan pencapaiannya ya selama ini kita selalu menginovasi dan meningkatkan apa yang kita konsep, ambil dan kita menjadi pilihan prinsip bisnis kita gitu” ucap bapak Hartanto

Pendapatan yang signifikan berasal dari segmen pasar yang menunjukkan potensi besar dalam industry pariwisata halal dan mayoritas pendapatan perusahaan berasal dari konsumen wisatawan yang mencakup lebih dari 65% dari total pendapatan.

“yang jelas karena mayoritas Masyarakat Indonesia kan muslim jadi tentunya juga persentasenya lebih tinggi yang muslim, makanya itu bisa terbilang lebih dari 65% lebih kita sesuaikan konsumen kita untuk menggerakkan halal tour itu tercapai lebih dari 65%”. Ucap bapak Hartanto

Dalam efisiensi dan produktivitas yang di sediakan Perusahaan dalam memberikan layanan/produk halal memberikan hasil yang cukup efisien karena Perusahaan mengetahui bagian mana dan daerah mana yang memiliki potensi halal yang lebih baik untuk para wisatawan khususnya wisatawan muslim.

“selama ini efisien, contoh kita hotel syariah nah itu dengan senang hati karena kita sama sama penjual jasa yakan. Kita juga bisa membedakan mana yang hotel syariah, mana yang hotel kadang Bintang empat atau lima yang ada kan yang skala internasional ada beer dan lainnya, walaupun terkadang tamu, mereka gak minum beer, tapi dari restorannya itu biasa kadang ada ketersediaan minuman yang berakohol” ucap bapak Hartanto

Jogja Halal Tour juga merasa senang jika pariwisata halal menjadi sebuah tren yang bisa wisatawan ikuti dan berharap tren itu bisa diikuti bukan hanya sektor pariwisata tapi juga sektor lainnya.

“ya kita juga ikut senang, kita sebagai apa namanya yang lebih halal tapi sekarang belum menjadi tren ya to, kita merasakan belum menjadi tren. Kita ikut senang kenapa karena apa menjadi bisnis bisnis travel yang lain itu mempertanggalkan secara lebih gitu, tidak melulu menghitung untung, melulu menghitung trafik kunjungan wisatawan dan lain lain gitu. Kita ikut senang” ucap bapak Hartanto

Dalam memastikan bahwa layanan/produk yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi, jogja halal tour telah mengetahui apakah restoran, hotel, atau tempat wisata memiliki sesuatu yang non halal maupun yang halal. Jadi disesuaikan sesuai permintaan wisatawan khususnya wisatawan muslim.

“sebenarnya akurasi untuk kita memastikan juga standar, artinya mereka Ketika sebuah restoran atau tempat hiburan itu kan kita mengetahui mereka juga memiliki apa perizinan halal atau didalam itu ada aktivitas berbau non halal atau sesuatu yang kurang lazim di islam kan kita juga tau.” Ucap bapak Hartanto

Pelaku bisnis Jogja halal tour ini focus pada penyediaan layanan pariwisata halal dengan menjamin kehalalan makanan dan aktivitas bagi wisatawan muslim. Meskipun menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan, kolaborasi dengan berbagai sektor serta komitmen untuk berinovasi,

membantu jogja halal tour dalam mencapai tujuan dan meningkatkan pengalaman wisatawan. Pendapatan yang signifikan berasal dari segmen pasar menunjukkan potensi beredar dalam industri pariwisata halal.

2. Komunitas Generasi Pesona Indonesia Jogja (GenPi Jogja)

Wawancara komunitas Generasi Pesona Indonesia Jogja dengan narasumber bapak Jalu selaku ketua GenPi, wawancara dilakukan di kantor komunitas GenPi pada tanggal 13 Nov 2024 pukul 11.13 WIB. Pariwisata halal menurut komunitas GenPi adalah memberikan fasilitas ibadah yang berada di dalam lokasi wisata untuk membantu para wisatawan dalam menjalankan ibadah, hal yang diperhatikan khususnya adalah kebersihan yang dianggap sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh bapak jalu dalam wawancara.

“ini based in the story pengetahuan kami di GenPi ya, bukan pribadi. Bukan saya yang menjawab artinya saya mewakili GenPi ya. Pariwisata halal itu dulu pernah di gaungkan sama Menteri sandiaga uno waktu itu, sebelumnya itu pernah di sanding ke sama pak arief yahya juga. Dan pariwisata halal itu kan menimbulkan beberapa persepsi, nah sebatas yang kami tau itu pariwisata halal itu adalah pariwisata yang dia memberikan atau yang mempunyai fasilitas untuk melakukan ibadah di Lokasi wisata. Kalau aku sih setuju dengan pariwisata halal Dimana perlakuannya memang di tempat tempat yang segmented seperti misalkan wisata keluarga, seperti kebun Binatang, itu silahkan.” Ucap bapak Jalu

Dalam konsep pariwisata halal penerapan kebijakannya perlu disesuaikan dengan konteks dan tidak semua destinasi harus menerapkannya

serta memfokuskan suatu daerah dengan menyesuaikan kebutuhan para turis asing yang tidak muslim.

“konsep pariwisata halal ini menjadi rancu ini, yang mana sih batasnya, koridornya. Seperti itu sehingga bagi kami wisata halal ini bisa diterapkan tidak semua destinasi hanya beberapa saja. gak mungkin yang suka, kalau gak suka

Komunitas GenPi tidak bekerja sama dengan organisasi pariwisata besar seperti GP atau Asita karena focus GenPi adalah memberdayakan Masyarakat dengan berkolaborasi bersama akademisi untuk pengembangan pariwisata. Dalam aktivitas mempromosikan event GenPi tidak hanya mempromosikan wisata halal tetapi juga dalam kegiatan non halal yang dapat juga memberikan kontribusi ekonomi.

“kenapa kita tidak banyak bekerja dengan GP atau ASITA gitu, karena GP atau ASITA itu lingkupnya sudah tinggi, terlalu tinggi menurut kami, dia sudah industry, bisnis pariwisata sementara kita komunitas ini membangun pemberdayaa Masyarakat jadi tidak terkait, maka kita tidak pernah bekerja sama dengan GP atau ASITA atau yang lainnya.”

Dalam mempromosikan pariwisata dan menjada budaya halal di kota jogja GenPi tidak hanya focus pada wisata halal tapi juga memperhatikan peluang pariwisata biasa yang menjadi pemasukan terbesar. GenPi ingin memberikan dorongan bagi semua pihak untuk melakukan balance wisata, baik wisata halal maupun wisata non halal tetapi dengan lokalisasi yang berada di satu tempat saja.

“justru kami ini berusaha mendorong semua pihak untuk ada wisata non halal, segmented tapi dilokalisasi dan diberi informasi bahwa ini merupakan wisata non halal. Jadi memang kalau di jogja Ketika kita bicara budaya ya semua harus dirangkul, kita gak bisa hanya budaya halal aja, jadi kalau disini hanya mempromosikan budaya halal, genpi sama sekali belum pernah dan tidak akan kita bawa kesana. Justru kita memberikan lokalisasi untuk wisata non halal, sehingga terkontrol dan itu yang kami harapkan.”

Hubungan kolaborasi dengan stakeholder lain lebih kepada hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak, Dimana semua pihak saling membutuhkan dan meguntungkan untuk memberikan hasil dari suatu kegiatan yang direncanakan.

“kita hanya membantu mereka untuk menjadi fasilitator bagaimana kita bisa memberikan kemampuan genpi dalam membantu suatu kegiatan, seperti kalau mereka butuh apa kita butuh apa saling tukar informasi seperti itu. Kalau untuk dukungan dari pihak lain semua kan harus saling bermanfaat ya artinya Ketika kita membantu instansi, kita juga ingin dinomor satukan untuk bisa menjadi income juga. Jadi saya merubah mindset dari GenPi yang pertama dibangun adalah sebagai relawan pariwisata, nah ini kita agak mencoret itu bukan relawan pariwisata tapi memang kita relawan yang bekerja Bersama Masyarakat, tetapi banyak yang disalah artikan yang menjadikannya sebuah pemanfaatan”

GenPi mengklasifikasi tantangan menjadi 2 bagian dalam internal dan eksternal. Untuk internal, yang menjadi tantangan adalah tujuan memasuki komunitas yang semua orang tidak memiliki pemikiran yang sama dan jumlah anggota yang benar benar ikut terlibat dalam sebuah program, Dimana GenPi mempunyai anggota yang banyak tetapi yang menjadi kendala adalah tujuan berpartisipasi dan halangan para anggota untuk ikut berpartisipasi dengan alasan yang beragam. Untuk eksternal, yang menjadi tantangan adalah

komunitas belum mempunyai legalitas secara mandiri sehingga mempengaruhi kelangsungan dalam mengambil atau membuat suatu kegiatan atau event, Dimana saat belum mempunyai legalitas secara mandiri komunitas perlu membuat laporan, rancangan anggaran, dan sebagainya.

“tantangan utama ini di internal dan eksternal ya, kalau internalnya itu anggota kita itu banyak tapi yang aktif, benar benar bisa aktif itu sedikit sekali saya rasa ada kesamaan di komunitas komunitas lain. Cuma untuk di GenPi ini memang aneh, aneh itu artinya gini kalau untuk komunitas sepeda, enak nih semua sepedaan semua. Komunitas fotografi, semua motret semua. Kalau pariwisata mau ngapain, apakah semua berwisata. Tidak. Bikin konten, tapi ada yang gak suka bikin konten. Kemudian apa, mau ngasih pemberdayaan, ada yang gak suka. Cuma suka main main aja. Yang kedua, member kita banyak yang dari mahasiswa, sehingga banyak ketika berkegiatan terdapat halangan, yang memang benar benar real sudah santai seperti aku ini ya bisa terus, tapi yang bekerja, kuliah gak bisa. Untuk yang eksternal kami ini belum secara mandiri punya legalitas, jadi kami ini hanya berdasarkan SK yang dikeluarkan kementrian, nah legalitas yang kami inginkan sebenarnya adalah bahwa komunitas ini punya NPWP sendiri, bisa ngurus pajak sendiri, dan sebagainya. Sehingga Ketika ada transaksional kita bisa menyelenggarakan itu dan sampai saat ini kita gak bisa. Dan itu menjadi kesulitan kami juga ketika ada aktivitas kita harus membuat laporan, RAB, faktur pajak, nah kita gak bisa. Sehingga kita hanya bisa ngambil yang kecil kecil aja, Cuma bantuin ini kasih seratus ribu, maka seperti itu kendala kami eksternal dan internal.”

GenPi menekankan bahwa penting untuk memperhatikan fasilitas ibadah dan kebersihan dan juga mengingatkan untuk penerapan konsep pariwisata halal harus konseptual dan tidak mengabaikan kebutuhan wisatawan yang berbeda. Kolaborasi dengan stakeholder lain perlu ditekankan pentingnya kolaborasi kergaman dalam penawaran pariwisata termasuk yang non halal untuk mendukung kebutuhan wisatawan asing.

3. Akademisi Pusat Studi Pariwisata UGM

Wawancara akademisi Pusat Studi Pariwisata Universitas Gajah Madha dengan narasumber Bapak Muhammad Yusuf selaku ketua pusat studi yang dilaksanakan di kantor Pusat Studi Pariwisata UGM pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 09.33 WIB. Narasumber berpendapat bahwa pariwisata halal merupakan sebuah *additional services* untuk para wisatawan terutama wisatawan muslim sehingga bisa memudahkan dalam menjalankan ajaran agama. Akademisi pusat studi pariwisata UGM menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata halal, tantangan yang perlu dihadapi seperti egosentris dari berbagai pihak stakeholder, serta perlunya fasilitas tambahan untuk wisatawan muslim saat berwisata.

“pariwisata halal itu kan dari yang saya baca dalam beberapa literature itu kan mencoba untuk memberikan additional service, bagi saya pariwisata halal itu additional service pada wisatawan terutama wisatawan muslim dan sehingga Ketika mereka berwisata mereka dapat menjalankan ajaran agamanya, misalnya additional services itu bisa dalam berbentuk tempat ibadah, mushola, arah kiblat, dan kemudian additional services dalam bentuk macam macam hal. Jadi kita perlu additional services tambahan supaya wisatawan muslim itu bisa lebih mudah menjalankan ajaran ibadah, ajaran agama atau beribadah pada saat mereka berwisata.”

Sebelum covid-19 terdapat tim percepatan pariwisata yang di dukung oleh kementerian pariwisata, untuk mengembangkan pariwisata halal dibutuhkan perhatian khusus dan regulasi yang jelas dari kementerian

pariwisata. Seperti dalam hasil wawancara Bersama ketua Pusat studi Pariwisata UGM, bapak Muhammad Yusuf:

“dulu di Indonesia kita dulu punya tim percepatan pariwisata halal itu ketuanya dr. anang dari poltek pari bandung tapi tim percepatan pariwisata halal itu habis masa bertugasnya di tahun 2020 kalau gak salah dan setelah itu tidak dilanjutkan. Dari dalam konteks Indonesia dulu kita pernah punya tim percepatan tapi di kota jogja sendiri saya gak tau seperti apa. Harusnya kalau memang jogja ingin mengembangkan pariwisata halal punya tim khusus untuk apa namanya memberikan perhatian khusus terkait dengan fasilitas tadi.”

“dari wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan, “oh berarti ugm ini belum mempunyai stakeholder yang berjalan?””

“kita gak perlu, alhamdulillah pariwisata umum gitu, kalau pariwisata yang khusus itu misalnya pariwisata halal ya itu urusan dari pemerintah”

Peran Lembaga penelitian diharapkan dapat melakukan kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Pengembangan pariwisata halal lebih memerlukan kolaborasi yang kuat antar berbagai stakeholder dengan dukungan kebijakan yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur karena Lembaga penelitian memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi yang berbasis kajian untuk meningkatkan kualitas pariwisata halal. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhammad Yusuf bahwa beliau meneliti pariwisata halal di 3 kota, yaitu kota Lombok, Aceh, dan Padang.

“lembaga penelitian yakan berarti harus melakukan penelitian bagaimana melakukan suatu kajian suatu penelitian yang memerlukan pengembangan pariwisata halal, kalau saya pribadi saya pernah melakukan penelitian pariwisata halal itu di 3 tempat, di aceh, dipadang, dan di Lombok. Dan

artikelnya sudah terbit jurnal internasional tahun 2024 ini sudah terbit di jurnal internasional. Jadi tugas peneliti adalah melakukan penelitian yang relevan yang dapat memberikan atau yang menghasilkan satu rekomendasi pariwisata halal di Indonesia”

“dari wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan, “berarti ugm belum ada proyek tentang pariwisata halal?””

“iya itu tadi, beberapa tahun yang lalu saya pernah dapet dana riset dari pemerintah pusat, dan beberapa daerah, beberapa kampus seingat saya, saya juga pernah di undang untuk jadi pembicara, itu yang mendapatkan dana penelitian untuk pariwisata halal itu dari uns solo, fakultas hukum. Dia dapat anggaran untuk melakukan penelitian tentang pariwisata halal di tahun 2023. Saya diminta untuk jadi pembicara jadi pengarah wisata”.

Kolaborasi antar stakeholder merupakan hal yang penting dalam pengembangan pariwisata halal serta perlunya fasilitas tambahan untuk wisatawan muslim agar dapat menjalankan ajaran agama saat berwisata.

“ya harus, karena pariwisata itu tanpa ada kolaborasi gak bisa berjalan, pariwisata itu harus bersinergi, harus apa namanya berkolaborasi karena itu jadi salah satu syarat untuk Pembangunan pariwisata yang optimal.”

akademisi berperan untuk melakukan penelitian terkait pariwisata halal dan membuat inovasi untuk membantu pemerintah dalam menentukan program yang akan dijalankan untuk melakukan pengembangan pariwisata halal dan dalam proses itu akademisi perlu dilibatkan, tetapi berdasarkan informasi yang diterima akademik tidak merasa dilibatkan dalam konteks pengembangan pariwisata halal

“dari wawancara tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan, “apakah ada umpan balik dari stakeholder lainnya untuk akademisi?””

“kan kita gak pernah dilibatkan, untuk penelitian kepuasan wisatawan yang dilakukan akademisi dengan pemerintah itu pariwisata secara umum bukan secara khusus pariwisata halal. Kalau terkait khusus pariwisata halal kita gak pernah dilibatkan. Untuk pariwisata umum kami masih dilibatkan”.

Selain itu, prof. Unggul Priyadi, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII juga berpendapat bahwa “pariwisata halal di jogja itu tidak ada, Pemerintah tidak pernah mengajak untuk berkolaborasi”.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia khususnya jogja memerlukan kolaborasi yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kolaborasi dengan stakeholder lain adalah kebijakan yang jelas serta melakukan pembagian tugas antara stakeholder, dan saling bersinergi untuk kemajuan pariwisata halal. Mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengembangan pariwisata halal, ego sentris yang menjadikannya tantangan utama dalam kolaborasi pengembangan pariwisata diantara stakeholder.

4. Pemerintah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Wawancara pemerintah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan narasumber Ibu Cesaria Eka Yulianti Sri Hastuti selaku Kepala Bidang Industry Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada 19 Nov 2024 pukul 12.34 WIB. Pemerintah dinas pariwisata kota yogyakarta telah menerapkan kebijakan untuk mendukung pariwisata halal seperti penyediaan mushola di hotel dan sertifikasi halal untuk restoran. Kebijakan ini pemerintah melakukan

pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa usaha pariwisata yang dijalankan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“kita banyak mushola di hotel hotel setiap kamarnya sudah ada arah kiblat dan pasti ada musholanya, restoran juga, terus ada tempat wudhu segala macam gitu kan. Berarti kan itu sudah ada untuk mendukung muslim friendly ya, kalau lebih terkenal muslim friendly. Kemudian kita mempunyai program untuk insentif ke restoran itu sertifikasi halal untuk restoran restoran sudah 2 tahun ini berjalan gitu kan, dan kita di kota itu kan banyak usaha pariwisata jogja yang luasnya hanya 32½ km² itu mempunyai 1531 usaha pariwisata. Itu ada 676 hotel, 655 restoran, nah itu kan pasti bisa dibayangin berarti itu semuanya pasti, pasti kalau di jogja. Coba ambil sampling aja berapa hotel gitu, lihat kamarnya pasti ada arah kiblatnya.”

Di Yogyakarta, sekitar 40% hotel telah mendapatkan sertifikasi halal, sementara 30% restoran juga telah disertifikasi halal. Selain itu, 20% dari lokasi wisata menyediakan tempat ibadah, dan 10% lainnya menawarkan fasilitas tambahan seperti toilet dan tempat wudhu (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2023).

Kebijakan yang telah diimplementasikan dipantau dengan pembinaan dan pengawasan secara berkala untuk memantau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

“dengan susun pembinaan dan pengawasan, jadi di kami kan ada pembinaan pengawasan untuk industry pariwisata, nah itu nanti ada bagaimana kita lihat kondisinya, apakah sesuai standarisasi dengan usaha pariwisata atau perizinan segala macam kan kita lihat dari segi pembinaan atau pengawasannya”

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk akademisi, komunitas untuk mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta. Dalam kolaborasi yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan pariwisata halal ada program yang telah dijalankan seperti sertifikasi halal dan CHSE (*Clean, Healthy, Safety, and Environment*), sertifikasi RBA.

“satu, terkait adanya pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata. Kedua, adanya sertifikasi halal dari dinas pariwisata, ada sertifikasi CHSE (clean, healthy, safety, and environment), sertifikasi RBA (retail bakers of America) itu kan salah satunya.”

Dalam setiap kolaborasi menciptakan berbagai kendala dan terbatasnya penagwasan karena kurangnya sumber daya sehingga pemerintah hanya dapat mengawasi sebagian kecil dari usaha pariwisata yang ada dan perlu adanya evaluasi untuk menilai dampak dari kebijakan yang diterapkan.

“kendalanya itu karena banyaknya usaha pariwisata, jadi untuk satu tahun, mungkin kami tidak bisa kunjungan keseluruhan 1300 sekian usaha pariwisata hotel sama resto, jadi mungkin hanya sekitar 1% atau 10 % nya aja yang bisa kami kunjungi. Karena terbatasnya anggaran”

Keberhasilan suatu kebijakan bisa di pastikan dengan berkomunikasi dengan stakeholder lainnya dengan membicarakan tentang evaluasi atau masukan dari hasil kebijakan yang telah di tetapkan dan dijalankan.

“dengan kita komunikasi dengan stakeholder lainnya, tuntutan halal seperti apa, ada yang perlu di lakukan evaluasi atau tidak, apa yang perlu ditingkatkan itu kan dari kolaborasi sama stakeholder itu. Kan disitu ada

swasta, disitu ada komunitas, nah itu kan sebagai koridor koridornya bagaimana pemerintah itu berjalan.”

Pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta melibatkan antara pemerintah dan berbagai stakeholder dengan kebijakan yang mendukung fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim, meskipun terdapat tantangan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan seperti sertifikasi halal dan pembinaan industry menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata halal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Stakeholder Quadruple Helix

Peran masing masing stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta, yaitu:

a. Pelaku usaha

- 1) Implementasi standar halal, Perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan standar halal dalam produk serta layanan. Perusahaan memberikan kebebasan kepada wisatawan dan menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka terutama dalam konteks wisata halal. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan layanan dan produk halal dengan memperhatikan waktu shalat dan memastikan makanan yang disajikan halal.

- 2) Inovasi produk, produk yang ditawarkan dalam setiap tour dapat diberikan sesuai dengan permintaan wisatawan karena Perusahaan memberikan kebebasan dari mulai paket wisata, tour pengalaman budaya, dan memastikan pengalaman positif bagi wisatawan serta menjaga kehalalan produk yang ditawarkan.
- 3) Kerjasama, Perusahaan telah melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan media sosial untuk mempromosikan pariwisata termasuk menerima berbagai kunjungan dari institusi Pendidikan.

b. Komunitas

- 1) Partisipasi aktif, komunitas atau Masyarakat berperan dalam mempromosikan pariwisata halal melalui kegiatan sosial. Dalam setiap event atau festival yang diadakan pemerintah komunitas membantu dalam mempromosikan kegiatan dengan membuat sebuah konten atau hanya sekedar membagikan rincian kegiatan di media sosial komunitas itu sendiri. Selain mempromosikan kegiatan yang diadakan pemerintah, komunitas memiliki visi misi tersendiri dengan tujuan untuk memberdayakan Masyarakat Yogyakarta agar bisa bersaing sehat dalam menjalankan sebuah destinasi, memberikan pelatihan atau edukasi untuk menjadikan sebuah destinasi yang pantas dan memiliki banyak pengunjung.

- 2) Dukungan budaya, sama dengan partisipasi aktif, dukungan budaya yang dilakukan komunitas bisa meliputi pemberdayaan atau edukasi tertentu dengan beberapa institute pendidikan, pembuatan sebuah konten, dan membagikan rincian kegiatan dalam media sosial.

c. Akademisi

- 1) Penelitian dan inovasi, Lembaga penelitian diharapkan melakukan kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal. Sebelum covid-19 datang kementrian pariwisata mempunyai tim percepatan pariwisata halal yang khusus untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, tetapi sekarang sudah dibubarkan karena pergantian kementrian. Untuk pengembangan pariwisata halal diperlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai stakeholder dengan dukungan kebijakan yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur. Tantangan egosentris harus dapat diatasi agar kolaborasi dapat berjalan efektif demi kemajuan pariwisata halal.

d. Pemerintah

- 1) Regulasi dan kebijakan, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata halal. Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk

mendukung pariwisata halal seperti penyediaan mushola di hotel dan sertifikasi untuk restoran sesuai dengan undang undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaanya dilakukan oleh BPJPH (badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau Lembaga terkait, MUI, dan LPH.

Dalam implementasi kebijakan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa usaha pariwisata dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kebijakan lainnya terdapat CHSE (Clean, Healthy, safety, and Environment) untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industry pariwisata. Dalam evaluasi kebijakan pemerintah melakukan evaluasi untuk menilai dampak dari kebijakan yang diterapkan.

- 2) Infrastruktur, pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta melibatkan antara pemerintah dan berbagai stakeholder dengan kebijakan yang mendukung fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatwan muslim, meskipun terdapat tantangan dalam pengawasan dan implementasi Langkah Langkah seperti sertifikasi halal dan pembinaan industry menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata halal.

- 3) Promosi dan pemasaran, dalam melakukan promosi dan pemasaran pemerintah mempunyai beberapa akun sosial media Instagram dengan username @pinarak.jogja dan @visitingjogja. Selain dengan aktif mempromosikan di sosial media, pemerintah juga bekerjasama dengan komunitas/Masyarakat dalam mempromosikan sebuah event atau festival yang terjadi di kota Yogyakarta.

Setiap stakeholder dalam quadruple helix memiliki peran yang unik dan beberapa saling melengkapi dalam pengembangan pariwisata halal di kota Yogyakarta. Pemerintah melakukan regulasi dan kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan melakukan promosi dan pemasaran. Akademisi melakukan penelitian dan memberikan inovasi. Pelaku usaha berperan dalam implementasi standar halal, inovasi produk, dan kerjasama. Komunitas melakukan partisipasi aktif, dukungan budaya, dan membuat feedback beserta saran. Sinergi antara keempat stakeholder sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata halal yang berkelanjutan dan menarik di Yogyakarta.

2. Efektivitas Kolaborasi Antar Stakeholder Quadruple Helix

Quadruple helix adalah hubungan antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, dan komunitas/Masyarakat dengan mengembangkan pandangan serta visi untuk mengatasi tantangan dan pemecahan masalah yang menekankan pada perspektif pengembangan inovasi. Kolaborasi quadruple helix ini akan menghasilkan sesuatu untuk bisa dapat berkembang, bertemu, berinteraksi untuk

mendorong kreativitas, menghasilkan penemuan dan mempercepat inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pandangan Prawirosneto Barnard, efektivitas dapat diukur melalui peran, kontribusi, dan kolaborasi masing masing stakeholder dalam mencapai tujuan Bersama. Untuk menilai stakeholder quadruple helix bersifat efektif atau tidak dalam pengembangan pariwisata halal, berikut beberapa indikator umum efektivitas kolaborasi quadruple helix:

1. Koordinasi antar stakeholder. Terdapat penyediaan sarana dan prasarana yang efektif untuk memastikan Kerjasama antar stakeholder,
2. Pencapaian tujuan bersama. Adanya kemampuan stakeholder untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata halal secara bersama-sama,
3. Evaluasi dan penyesuaian. Melakukan proses evaluasi yang rutin dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi,
4. Dampak positif. Terdapat peningkatan jumlah wisatawan muslim, pendapatan pendapatan pariwisata dan kepuasan wisatawan.

Tujuan pengembangan pariwisata halal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas bagi Wisatawan Muslim. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata halal adalah untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi wisatawan Muslim, termasuk

fasilitas ibadah, makanan halal, dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023.)

2. Pelestarian Budaya dan Nilai-Nilai Islam. Pariwisata halal berfokus pada pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memberikan pengalaman yang autentik bagi wisatawan Muslim (World Tourism Organization (WTO).)
3. Meningkatkan Kualitas Layanan dan Fasilitas. Tujuan pengembangan pariwisata halal adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ditawarkan kepada wisatawan Muslim, termasuk akomodasi, restoran, dan tempat ibadah (CrescentRating.)
4. Meningkatkan Citra Destinasi sebagai Tujuan Wisata Halal. Pengembangan pariwisata halal bertujuan untuk membangun citra positif dan daya tarik destinasi sebagai tujuan wisata halal yang ramah bagi wisatawan Muslim (Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2024.)

Kerjasama stakeholder dapat mengembangkan pariwisata halal dengan berbagai peran. Pemerintah melakukan regulasi kebijakan sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan arahan untuk memperbaiki fasilitas yang sesuai dengan wisatawan muslim. Akademisi melakukan kajian yang relevan untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, tetapi dalam pariwisata halal akademisi kurang dilibatkan oleh pemerintah. Pelaku usaha melakukan implementasi standar halal yang telah ditetapkan oleh

pemerintah dan berkomitmen untuk menyediakan layanan dan produk halal dengan memperhatikan waktu shalat serta memastikan makanan yang disajikan halal. Komunitas melakukan partisipasi aktif dengan berkunjung dan mempromosikan event atau festival yang diadakan oleh pemerintah atau mengunjungi destinasi budaya. Pemerintah telah melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha dengan mengadakan sertifikasi halal pada restoran dan hotel serta melakukan *clean, healthy, safety, and environment* pada programnya sehingga program sertifikasi bisa dilakukan dengan baik.

Dalam efektivitas kolaborasi pemerintah dengan dinas pariwisata kota Yogyakarta dengan pelaku bisnis Jogja Halal Tour berjalan dengan baik. Kebutuhan pelaku bisnis Jogja Halal Tour adalah menerapkan standar halal, menyediakan akomodasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah serta merekomendasikan beberapa tempat yang telah memiliki sertifikasi halal pada hotel maupun restoran. Kualitas layanan yang menyesuaikan wisatawan muslim dengan layanan yang ramah termasuk dalam hal kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Memiliki beberapa hubungan dengan akademisi maupun komunitas sebagai pelanggan ataupun agentour.

Dalam efektivitas kolaborasi pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta dengan komunitas generasi pesona Indonesia Jogja (GenPi Jogja) berjalan dengan baik dikarenakan dalam keterlibatan komunitas yang mendukung pengembangan pariwisata halal didukung penuh oleh komunitas GenPi Jogja yang memiliki prinsip memberdayakan atau membantu Masyarakat dalam sebuah event maupun

project. Dalam aktivitas mempromosikan event GenPi melakukan promosi dengan tidak memfokuskan hanya pada pariwisata halal tetapi juga pariwisata non halal, ini menunjukkan sikap positif terhadap kedatangan wisatawan muslim maupun nonmuslim.

Dalam efektivitas kolaborasi pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta dengan akademik pusat studi pariwisata UGM melakukan kolaborasi dengan pemerintah terkait pariwisata secara umum. Dalam konteks pariwisata halal akademisi tidak melakukan penelitian dengan bantuan pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta, melainkan narasumber yang melakukan penelitian di 3 kota di Indonesia yaitu Padang, Lombok, dan Aceh. Untuk kolaborasi terkait pengembangan pariwisata halal menurut argument Prof. Unggul Priyadi, Yogyakarta memang tidak memiliki pariwisata halal, memang terdapat konsep pariwisata halal tetapi hanya terdiri dari perencanaan. Meskipun dalam pengembangan pariwisata halal tidak melibatkan akademisi tapi dalam pariwisata umum akademisi turut berkontribusi untuk melakukan kolaborasi.

Dengan perencanaan pengembangan pariwisata halal pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Rencana Induk Jogja *Smart Province* yang berlaku untuk periode 2024-2028. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pemerintah perlu pendekatan kreatif dan inovatif dalam penyelesaian isu strategis/pengembangan sektor unggulan melalui kolaborasi antar wilayah untuk tercapainya kehidupan Masyarakat Yogyakarta yang baik. Sasaran pembangunan *smart province* pada pariwisata

bertujuan menjadikan DIY salah satunya kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata, budaya, dan Pendidikan berstandar internasional, dengan tujuan seperti itu perlu kolaborasi yang kuat untuk tercapainya *smart culture/smart branding* pada bidang pariwisata khususnya pariwisata halal. *Smart culture/smart branding* yang diberikan kepada bidang kerja sektor budaya dan pariwisata, stakeholder lainnya seperti akademisi, pelaku usaha, dan komunitas/Masyarakat bisa mengikuti arahan yang diberikan pemerintah tentang Tindakan lanjutan dalam merealisasikan pengembangan pembangunan pariwisata atau pariwisata halal.

Salah satu strategi *smart branding* pada pariwisata yaitu pemanfaatan teknologi dalam pengembangan atraksi dan promosi pariwisata sesuai dengan ‘Mode 3’ quadruple helix dari pemikiran Carayannis dan Campbell, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan dalam mendukung pelestarian, pengembangan, dan perlindungan kearifan lokal sampai pada Tingkat daerah kabupaten/kota. *Branding* pariwisata dalam kota Yogyakarta sangat kuat tetapi bukan berarti tidak adanya tantangan atau permasalahan. Untuk melindungi *branding* pariwisata kota Yogyakarta masih diperlukan Kerjasama lintas sektor, kecepatan, dan ketepatan dalam mengatasi isu strategi yang ada. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah membuktikan bahwa total pengunjung dalam 3 tahun terakhir meningkat secara konsisten, kebijakan yang telah diterapkan diantaranya promosi intensif destinasi halal dan peningkatan

fasilitas ibadah, event pariwisata halal dan kolaborasi dengan industry makanan halal kemudian sertifikasi halal pada restoran.

Beberapa tantangan dari para stakeholder quadruple helix salahsatunya menghadapi egosentris dari berbagai pihak, kemudian dibutuhkan perhatian khusus untuk bisa mengembangkan pariwisata halal, serta terbatasnya sumber daya untuk melakukan evaluasi pada kebijakan yang telah diterapkan yang mempengaruhi kualitas kinerja dalam pengembangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran stakeholder quadruple helix dapat meliputi pemerintah menjalankan regulasi kebijakan, pengontrolan kebijakan, mempromosikan kebijakan. Akademisi dapat melakukan penelitian tentang tren pariwisata halal serta mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Pelaku bisnis mengimplementasikan sebaik mungkin kebijakan yang ditetapkan dan bekerjasama dengan stakeholder lain dengan visi dan tujuan yang sama. Komunitas berpartisipasi dengan aktif disetiap kebijakan atau event, menghargai dukungan budaya, dan memberikan feedback pada masyarakat yang menjadikan konten sebagai konsumsi masyarakat.
2. Efektivitas kolaborasi antar stakeholder quadruple helix dalam pengembangan pariwisata halal masih belum efektif dan belum terjalin Kerjasama yang signifikan antara stakeholder stakeholder lainnya. Akademisi merasa bahwa dalam mengembangkan pariwisata halal belum pernah dilibatkan, sementara pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan terkait pengembangan pariwisata halal salah satunya sertifikasi halal di restoran. Kemudian pemerintah telah melibatkan komunitas hanya dengan sebatas sukarela, namun

komunitas merasa bahwa tidak ada feedback yang diterima setelah bekerja sama dengan pemerintah.

B. Saran

Adapun peneliti memiliki banyak kekurangan dan melihat banyak informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, seperti data restoran yang telah terdaftar dalam sertifikasi halal dari pemerintah, kurangnya objek penelitian, dan lain hal. Peneliti melihat bahwa masih banyak peluang untuk setiap stakeholder berkembang baik dengan stakeholder lainnya serta perlunya berkoordinasi agar pariwisata halal di Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta bisa berkembang dengan sangat baik dan tercapainya program *smart culture/smart branding* selama 3 tahun kedepan. Adapun terkait dengan saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penambahan pada data kuantitatif untuk mendukung analisis, seperti tingkat kepuasan terhadap suatu destinasi dan dampak ekonomi pariwisata halal,
2. Memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar stakeholder,
3. Pemerintah perlu mengembangkan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengukur dampak dari program seperti sertifikasi halal dan CHSE,

4. Promosi pariwisata halal perlu diperluas ke pasar internasional yang dapat dilakukan dengan Kerjasama bersama platform pariwisata global atau negara dengan pasar wisata muslim yang besar,
5. Dalam pariwisata halal keterlibatan akademisi perlu ditingkatkan melalui Kerjasama pelatihan SDM dan pengembangan inovasi yang mendukung pariwisata halal,
6. Pengembangan penelitian perlu lebih spesifik lagi dalam mengambil informan utamanya yang menjadikan penelitian lebih terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadri, F. (n.d.). *Peran Quadruple Helix Dalam Meningkatkan Kreatifitas dan Inovasi Industri Kreatif Berbasis Syariah*.
- Alfadri, F., & Novianti, D. (2024). *Sustainable Tourism Development: The Role of Quadruple Helix*.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., & Jane, A. F. (n.d.). *Model Quadruple Helix sebagai Prinsip Desain Smart Village dalam Pengembangan Desa di Indonesia*.
- Arif, M., Rokan, M. K., & Kumala, R. (2023). *QUADRUPLE HELIX MODEL IN THE DEVELOPMENT OF HALAL MICRO BUSINESS IN NORTH SUMATRA*. 12(1).
- Berita Resmi Statistik. (2024, June 3). Badan Pusat Statistik. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=jWpMb7ZnwahiH5gjakdnn241WTVUVWRaVEt5cmg3d2doTDF2Y2RiVXkxSHRlVzAwa1pGc1hSdENLSzN3U3NaRUUpBZDVzNkZlUnlMZ0RldzgraWk3eEpNVWZLdlFweGZFZUdFMTFKWWZKc0N1QnYzT1JZaThnVXpaQ090TWwwbkhlanV2eG83NGF3WGhIRFcwWXVRYjNEM2twYnRUWjc0L25HUFU5T2VBVDNuYzkrOFR4azIzcmw5ZGZFdDl1cEs0QnBKeHBlTUN2M0swbVI4bA==&_gl=1*1spixn9*_ga*MTM4MzU0NDY2LjE3MDY1MzMwOTQ.*_ga_XXTTVXWHDB*MTc0MTU5NDQyOC4yLjAuMTc0MTU5NDQyOC4wLjAuMA..
- Djakfar, D. H. M., & Press, U.-M. (n.d.). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*.
- Dwi, A., Wadu, R. B., & Nopiyanti, A. (2021). *Daya Dukung Penta Helix Terhadap Kinerja Manajemen UMKM di Serang Banten*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.

- Fitri, S. E. (2023). Pemetaan Potensi Pariwisata di Kota Yogyakarta dalam Rangka Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.46891/kainawa.5.2023.31-42>
- Fitriadi, Y., & Fahmy, R. (2022). *Kolaborasi Model Quadpel Helix Dalam Pengembangan Smart City; Sebuah Tinjauan Teoritis*. 5(2).
- GMTI 2023 Report Final Version 1st June. (2023, June). crescent rating. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2023.html>
- Hasan, H. A. (n.d.). *PARIWISATA HALAL: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA NEW NORMAL*.
- H. Faizul abrori, M. (Juni 2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Jakarta: Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Imron, M. (2020). *KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM MENCIPTAKAN INOVASI KONSEP WISATA EDUKASI KAMPUNG NANAS DI DESA PALAAN*. 4(2).
- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Khitam, M. C. (2022). *Kolaborasi Quadruple Helix: Pengembangan Eduwisata Semaggot (Sekaran Edukasi Maggot) berbasis potensi Desa*. 14(1).
- Lestari, F., Adzkia, M. D., Abdul, A. B., & Nurainun, T. (2025). *HALAL SUPPLY CHAIN STRATEGY IN THE LEATHER INDUSTRY USING THE QUADRUPLE HELIX MODEL*. 30.
- Maharani, A. K. (2024, January 12). Indeks Perjalanan Muslim Global 2023, Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Ramah Muslim di Dunia. *GoodStats*.

<https://goodstats.id/article/indeks-perjalanan-muslim-global-2023-indonesia-peringkat-pertama-destinasi-ramah-muslim-di-dunia-hudoX#:~:text=Kendati%20sempat%20mengalami%20keterpurukan%20akibat,setara%20dengan%2068%25%20dari%20jumlah>

Marpaung, M., & Yolanda, U. (n.d.). *Model Quadruple Helix dalam Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada Industri Pisang Sale Kutacane Kab. Aceh Tenggara)*.

Martauli S, H. ., Andri, A., Apriansah, D., Kamaludin, K., & Juriani, T. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN OLEH BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(2), 113–128. <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82>

Mastercard-Crescentrating_Global_Muslim_Travel_Index_2024_-_30_June_2024.pdf. (2024, May). crescent rating.

Misbar, A., & Novianti, D. (n.d.). MODEL QUADRUPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI OMAH JAMU YOGYAKARTA. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6).

Muis, M. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 22(1), 41. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>

Nasution, A. I. L., Hasibuan, R. R. A., & Syarvina, W. (n.d.). *Analisis Pariwisata Halal Terhadap Keputusan Wisatawan (Studi Kasus Wisata di Aceh)*.

- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2020). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 275. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i2.8160>
- Nurlatifah, I. (n.d.). *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA: PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI*.
- Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafii, M.Si. (2019). *Ilmu Pemerintahan* (Suryani, Ed.; Cetakan keenam). PT Bumi Aksara.
- Rahardjo, V. (n.d.). *Template Memandu Muslim Traveler Dalam Pengembangan Pariwisata Daerah*.
- Rahma, F. (n.d.). Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/?srsId=AfmBOooWIAy5wkTr76M1YvpJcyO-TcTE0dfOLhaRt-Ecc5DOIAxnbu5Cv>
- Rahmi, A. N. (2020). PERKEMBANGAN PARIWISATA HALAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.226>
- Rahtomo, R. W. (2018). Ekosistem Destinasi Pariwisata Halal Wadah Pengembangan Destinasi Pariwisata Ramah Muslim. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 2(2), 64–70. <https://doi.org/10.34013/jk.v2i2.22>

- Rezqy, V. O., & Fikriyah, K. (2021). *PERAN QUADRUPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KAWASAN WISATA CISARUA-LEMBANG*. 4.
- Ropik, A., & Kawwami, A. M. (2022). *Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friendly” Dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam*. 1.
- Sakina, A. W., Wedadjati, R. S., & Adiwirahayu, A. (n.d.). *Model Sinergitas Quintuple Helix dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Mina Wisata Technopark Sleman*. 5(1).
- Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20.
<https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13>
- Sari, F. K., Safitri, N., & Anggraini, W. (2019). Persepsi, Sikap dan Minat Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 137. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.857>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). HALAL TOURISM: DEVELOPMENT, CHANCE AND CHALLENGE. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Shofi'unnaifi, S. (2020). Muslim Milenial sebagai Katalisator Industri Pariwisata Halal Indonesia: Mencari Titik Temu Potensi dan Atensi. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 89.
<https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3096>
- Suyadi, Anom Wahyu Asmorojati, Zalik Nuryana, Waharjani, Fian Damasdino, Danang Kurniawan, Sena, & Zahra Nurhaliza. (2022, November 26). *Desa wisata halal*

- tanggung bencana: Kolaborasi pentahelix pengembangan wisata halal di Kelurahan Hargobinangun, Pakem Slem, Yogyakarta.*
- Syahrial, M. (n.d.). *MODEL PENTA HELIX DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI SUMATERA BARAT.*
- SYARIPUDDIN. (2020). *STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (KABUPATEN ACEH TENGAH).pdf.*
- Wirata, G., & Handayani, M. M. (2023). *Kebijakan pengembangan ecowisata berbasis komunitas di Indonesia: Sebuah pendekatan quadruple helix.* 9(4).
- Wirdayanti, A., & Ariani, V. (Eds.). (2021). *PEDOMAN DESA WISATA.* Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ngawi pada tanggal 01 Mei 2002 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Dwi Muryono dan Dariyem. Saat ini ia bertempat tinggal di Perumahan Griya Asri blok M1/07 RT 11 RW 11 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. No Hp: 085797387328. Alamat E-mail: damarsasim@gmail.com. Pendidikan SMA di tempuh di MA Persis Tarogong, Garut. Lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti kuliah di program studi Ekonomi Islam, Penulis pernah menjalani beberapa kepanitian diantaranya sebagai Trial Adhikari Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Temu Ilmiah Nasional XXI 2022, dan Mengikuti Magang di Lembaga Wakaf Uang Unisia.

DAFTAR WAWANCARA PADA SUBJEK PENELITIAN

5. Pemerintah

D. Pemerintah (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)

Pertanyaan umum

1. Apa yang anda ketahui tentang pariwisata halal dan pariwisata biasa?
2. Apakah lembaga mempunyai stakeholder pentahelix yang sedang atau sudah berjalan?
3. Apa kebijakan dan regulasi utamam yang telah diterapkan pemerintah untuk mendukung pengembangan pariwisata halal?
4. Bagaimana pemerinah memastikan kebijakan tersebut di implemtasikan dengan baik?
5. Bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam pengembangan pariwisata halal?
6. Apa mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi tersebut?
7. Bagaimana anda mengatur efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan dalam mendukung pariwisata halal?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam implementas kebijakan tersebut?
9. Bagaimana pemerintah mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan terhadap pengembangan pariwisata halal?
10. Apakah ada bentuk dukungan finansial kepada pelaku usaha pariwisata halal?

Indikator pencapaian tujuan

11. Apa tujuan utama peemrintah dalam mendukung pengembangan pariwisata halal? Dan bagaimana anda mengukur pencapaiannya?
12. Bagaimana anda memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan?

Indikator kepuasan stakeholder

13. Bagaimana pemerintah mengukur kepuasan dalam kolaborasi pentahelix?
14. Seberapa puas anda dengan kontribusi dan partisipasi stakeholder lain dalam program pengembangan pariwisata halal?

Indikator efisiensi dan produktivitas

15. bagaimana pemerintah mengukur efisiensi dan produktivitas dari program atau kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pariwisata halal?
16. Seberapa efisien pemerintah bekerja dengan stakeholder lain dalam implementasi kebijakan dan program pariwisata halal?

Indikator kemampuan adaptasi

17. Bagaimana pemerintah menyesuaikan kebijakan atau program untuk merespon perubahan dalam pariwisata halal?
18. Apakah ada inisiatif baru yang dilakukan untuk menghadapi tantangan terbaru dalam pengembangan pariwisata halal?

Indikator kualitas layanan/produk

19. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan untuk mendukung pariwisata halal memiliki kualitas tinggi?
20. Apakah ada mekanisme evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan atau program?

Indikator koordinasi dan komunikasi

21. Bagaimana pemerintah mengatur komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dalam menyelenggarakan acara atau program pariwisata halal?
22. apakah ada platform atau forum khusus yang digunakan untuk memastikan semua stakeholder terlibat dan informasi disampaikan dengan tepat?

6. Akademisi

PEDOMAN WAWANCARA

A. Akademisi (Pusat Studi Pariwisata UGM)

Pertanyaan umum

1. Apa yang anda ketahui tentang pariwisata halal dan pariwisata biasa?
2. Apakah lembaga mempunyai stakeholder pentahelix yang sedang atau sudah berjalan?
3. Apa peran utama universitas/lembaga penelitian anda dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di kota yogyakarta?
4. Bisa anda jelaskan proyek/penelitian spesifik yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pariwisata halal?
5. Bagaimana anda berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam proyek pariwisata halal?
6. Sejauh mana kolaborasi ini efektif menurut anda?
7. Apa faktor utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi anda dengan stakeholder lain?
8. Apa tantangan utama yang anda hadapi dalam menjalankan peran anda dalam kolaborasi ini?
9. Apakah anda pernah bekerja sama dengan pelaku industri dalam proyek penelitian? Jika pernah, bagaimana pengalaman tersebut?
10. Bagaimana hasil penelitian anda diterima dan diterapkan oleh stakeholder lain dalam pengembangan pariwisata halal?

Indikator pencapaian tujuan

11. Bagaimana universitas anda mengukur keberhasilan dalam mendukung pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta?
12. Apa tujuan utama yang ingin dicapai dalam proyek atau penelitian pariwisata halal?

Indikator kepuasan stakeholder

13. Bagaimana anda mengukur kepuasan universitas/lembaga penelitian anda dalam kolaborasi pentahelix?
14. Seberapa puas anda dengan kontribusi stakeholder lain dalam mendukung penelitian pariwisata halal?

Indikator efisiensi dan produktivitas

15. Bagaimana anda mengukur efisiensi dan produktivitas dari proyek penelitian yang dilakukan terkait pariwisata halal?
16. Seberapa efisien proses kolaborasi antara universitas anda dengan stakeholder lain dalam mendukung penelitian?

Indikator kemampuan adaptasi

17. Bagaimana lembaga penelitian anda menyesuaikan penelitian/program terkait pariwisata halal ketika ada perubahan kebijakan atau tren baru?
18. apakah anda bisa memberikan contoh adaptasi yang berhasil dilakukan oleh tim anda?

Indikator kualitas layanan/produk

19. Bagaimana anda mengukur kualitas penelitian atau publikasi yang dihasilkan terkait pariwisata halal?
20. Apakah ada umpan balik dari stakeholder lain tentang kualian penelitian anda?

Indikator koordinasi dan komunikasi

21. Bagaimana anda mengatur komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dalam proyek penelitian atau iniatif pariwisata halal?
22. apakah ada saluran komunikasi khusus yang digunakan untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan efektif?

7. Pelaku Bisnis

B. Bisnis (Jogja Halal Tour)

Pertanyaan umum

1. Apa yang anda ketahui tentang pariwisata halal dan pariwisata biasa?
2. Apakah lembaga mempunyai stakeholder pentahelix yang sedang atau sudah berjalan?
3. Bagaimana perusahaan anda berkontribusi dalam menyediakan layanan/produk halal bagi wisatawan?
4. Apa inisiatif terbaru yang telah anda lakukan untuk mendukung pariwisata halal?
5. Bagaimana anda berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam pengembangan pariwisata halal?
6. Apa bentuk dukungan yang anda terima dari stakeholder lain?
7. Bagaimana anda mengukur efektivitas dari kontribusi bisnis anda terhadap pariwisata halal?
8. Apa kendala terbesar yang anda hadapi dalam memenuhi standar halal?
9. Bagaimana perusahaan anda memastikan pengalaman positif bagi wisatawan halal?

Indikator pencapaian tujuan

10. Apa tujuan utama perusahaan anda dalam mendukung pariwisata halal? Dan bagaimana anda mengukur pencapaiannya?
11. Seberapa besar kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata halal terhadap keseluruhan pendapatan perusahaan anda?

Indikator kepuasan stakeholder

12. Bagaimana anda mengukur kepuasan bisnis anda dalam kolaborasi dengan stakeholder pentahelix?
13. Seberapa puas anda dengan dukungan yang diterima dari stakeholder lain dalam pengembangan pariwisata halal?

Indikator efisiensi dan produktivitas

14. Bagaimana anda mengukur efisiensi dan produktivitas dari layanan/produk halal yang disediakan perusahaan anda?
15. Seberapa efisien anda bekerja dengan stakeholder lain dalam mengembangkan dan memasarkan layanan atau produk halal?

Indikator kemampuan adaptasi

16. Bagaimana perusahaan anda merespons perubahan tren baru dalam pasar wisata halal?
17. apakah anda bisa memberikan contoh adaptasi yang berhasil dilakukan oleh tim anda?

Indikator kualitas layanan/produk

18. Bagaimana anda memastikan bahwa layanan atau produk halal yang ditawarkan memenuhi standar kualitas tinggi?
19. Bagaimana anda menindaklanjuti umpan balik pelanggan tentang kualitas layanan atau produk anda?

Indikator koordinasi dan komunikasi

20. Bagaimana perusahaan anda berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain untuk mendukung pengembangan pariwisata halal?
21. Apakah ada tantangan yang anda hadapi dalam memastikan komunikasi yang efektif dengan stakeholder lain? bagaimana anda mengatasinya?

4. Komunitas

C. Komunitas (Generasi Pesona Indonesia Jogja)

Pertanyaan umum

1. Apa yang anda ketahui tentang pariwisata halal dan pariwisata biasa?
2. Apakah lembaga mempunyai stakeholder pentahelix yang sedang atau sudah berjalan?
3. Bagaimana kontribusi anda dalam berpartisipasi untuk mempromosikan dan menjaga budaya halal di kota Yogyakarta?
4. Apa kegiatan/acara yang telah anda selenggarakan untuk mendukung pariwisata halal?
5. Bagaimana anda bekerja sama dengan stakeholder lain dalam inisiatif pariwisata halal?
6. Apa jenis dukungan yang paling anda butuhkan dari stakeholder lain?
7. Sejauh mana anda merasa komunitas anda berhasil dalam mendukung pariwisata halal?
8. Apa tantangan utama yang anda hadapi dalam partisipasi komunitas?
9. Apakah komunitas anda mendapatkan dukungan infrastruktur dari pemerintah atau organisasi lain untuk mendukung pariwisata halal?
10. Bagaimana komunitas anda meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata halal?

Indicator pencapaian tujuan

11. Bagaimana anda mengukur dampak dari kegiatan yang dilakukan komunitas terhadap pariwisata halal?
12. Apa tujuan utama komunitas anda dalam mempromosikan pariwisata halal? Dan bagaimana anda mengukur keberhasilannya?

Indicator kepuasan stakeholder

13. Bagaimana komunitas anda mengukur kepuasan dalam kolaborasi pentahelix?
14. Seberapa puas komunitas anda dengan hasil dari kolaborasi dengan stakeholder lain dalam mendukung pariwisata halal?

Indicator efisiensi dan produktivitas

15. Bagaimana komunitas anda mengukur efisiensi dan produktivitas dari kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pariwisata halal?
16. Seberapa efisien komunitas anda berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam menjalankan kegiatan promosi dan budaya lain?

Indicator kemampuan adaptasi

17. Bagaimana komunitas anda beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau preferensi wisatawan halal?
18. Apakah anda bisa memberikan contoh adaptasi perubahan program yang berhasil dan memenuhi ekspektasi wisatawan halal?

Indicator kualitas layanan/produk

19. Bagaimana komunitas anda memastikan bahwa program atau acara yang diselenggarakan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh wisatawan halal?
20. Apakah ada evaluasi dari peserta acara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas program anda?

Indicator komunikasi dan koordinasi

21. Bagaimana komunitas anda mengatur koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder lain dalam menyelenggarakan acara atau program pariwisata halal?
22. Apakah ada metode khusus yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif di dalam komunitas?